



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2020



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

2020

© 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta – 55187

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415, Email: pt.yogya@gmail.com

Website: www.pt-yogyakarta.go.id

**PIMPINAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
KETUA DAN WAKIL**



SURIPTO, S.H., M.H.
Ketua



GATOT SUHARNOTO, S.H.
Wakil Ketua

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PANITERA DAN SEKRETARIS**



R. KUNITIAS A, S.H., M.H.
Panitera



Drs MUHIDIN, M.H.
Sekretaris

**PIMPINAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KLAS I.A
KETUA DAN WAKIL**



FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.

Ketua



Dr. FAHMIRON, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KLAS I.A
PANITERA DAN SEKRETARIS**



ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.H.

Panitera



WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.

Sekretaris

**PIMPINAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN KLAS I.A
KETUA DAN WAKIL**



ANNAS MUSTAQIM, S.H., M.Hum
Ketua



ROSIHAN JUHRIAH R, SH, MH.
Wakil Ketua

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KLAS I.A
PANITERA DAN SEKRETARIS**



RIDWAN NURDIN, SH.
Panitera



Sekretaris

**PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I.B
KETUA DAN WAKIL**



ALIMIN RIBUT S, S.H., M.H.
Ketua



Wakil Ketua

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I.B.
PANITERA DAN SEKRETARIS**



RUDI SAFARI, S.H., M.H.
Panitera



YUYUN FITHRIYAH, SE. Ak.
Sekretaris

**PIMPINAN PENGADILAN NEGERI WATES KLAS I.B
KETUA DAN WAKIL**



**IWAN ANGGORO WARSITA, SH., M.Hum
Ketua**



**HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.
Wakil Ketua**

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI WATES KLAS I.B
PANITERA DAN SEKRETARIS**



**SUHARDI, S.H.
Panitera**



**WIRATNO, S.H.
Sekretaris**

**PIMPINAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI KLAS II
KETUA DAN WAKIL**



EMAN SULAEMAN, S.H.
Ketua



Y.F. TRI JOKO GP, S.H., M.H.
Wakil Ketua

**KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI WONOSARI KLAS II
PANITERA DAN SEKRETARIS**



HERI HARJANTO, S.H.
Panitera



SUPARLAN, S.H.
Sekretaris

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat kami sajikan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2020 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pengawasan serta bidang pembangunan sarana prasarana fisik, pengembangan Teknologi Informasi dan Perbaikan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan terwujud.

Hal tersebut selaras dengan tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat tercapainya Visi Mahkamah Agung RI.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai bahan evaluasi yang berguna bagi seluruh badan peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se - D.I. Yogyakarta dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Yang Agung.



Yogyakarta, 13 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SURIPTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	5
C. Visi, Misi, Dan Tujuan	6
D. Program Kerja	6
E. Rencana Strategis	7
BAB II MANAJEMEN PERADILAN UMUM	8
A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta	8
B. Penyelesaian Perkara	19
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	27
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	30
A. Mutasi	33
B. Promosi	33
C. Pensiun	34
D. Diklat	34
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	35
A. Pengelolaan Keuangan	35
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	56
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	74
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	85
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	85
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	87
C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	88
D. Inovasi Pelayanan Publik	90
E. Kegiatan Pelayanan Lainnya	108



BAB VI	PENGAWASAN	111
A.	Internal	111
B.	Evaluasi	112
BAB VII	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran Dan Rekomendasi	114
DAFTAR LAMPIRAN	115

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/276/SK/KPT/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Keadaan perkara peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2020...	8
Tabel 2.2	: Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020.....	8
Tabel 2.3	: Keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama se D.I. Yogyakarta tahun 2020.....	11
Tabel 2.4	: Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2020	12
Tabel 2.5	: Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2020.....	13
Tabel 2.6	: Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	14
Tabel 2.7	: Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2020.....	15
Tabel 2.8	: Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2020	15
Tabel 2.9	: Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2020	16
Tabel 2.10	: Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2020.....	17
Tabel 2.11	: Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2020	18
Tabel 2.12	: Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2020	19
Tabel 2.13	: Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 Yang Diputus Tahun 2020.....	19
Tabel 2.14	: Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 Yang Diputus Tahun 2020	20
Tabel 2.15	: Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020 .	21
Tabel 2.16	: Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020...	22
Tabel 2.17	: Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020.....	24
Tabel 2.18	: Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020.....	24
Tabel 2.19	: Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2020.	25
Tabel 2.20	: Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2020.....	26
Tabel 2.21	: Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020.....	26
Tabel 2.22	: Statistik Posbakum Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	27
Tabel 2.23	: Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2020.	29
Tabel 3.1	: Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	31
Tabel 3.2	: Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2020.....	33
Tabel 3.3	: Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2020	33
Tabel 3.4	: Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2020.....	34
Tabel 3.5	: Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2020.....	34

Tabel 4.1	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan TA. 2020.....	36
Tabel 4.2	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	37
Tabel 4.3	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	39
Tabel 4.4	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Sleman Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	43
Tabel 4.5	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wates Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	45
Tabel 4.6	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Bantul Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	48
Tabel 4.7	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wonosari Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	50
Tabel 4.8	: Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 01 Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020	52
Tabel 4.9	: Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020	52
Tabel 4.10	: Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 01 BUA Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	53
Tabel 4.11	: Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 03 BADILUM Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020...	54
Tabel 4.12	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Khusus Penanganan COVID-19 Thn 2020 .	55
Tabel 4.13	: Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2020	56
Tabel 4.14	: Daftar Rumah Negara Tahun 2020.....	56
Tabel 4.15	: Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2020	57
Tabel 4.16	: Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2020	58
Tabel 4.17	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020	58
Tabel 4.18	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020.....	58
Tabel 4.19	: Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020	61
Tabel 4.20	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020.....	63
Tabel 4.21	: Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2020.....	74
Tabel 4.22	: Keadaan Verifikasi Advokat di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta	76
Tabel 4.23	: Jumlah Perkara di wilayah D.I. Yogyakarta Yang Daftarkan Melalui e-Court Tahun 2020	76
Tabel 4.24	: Alamat SIPP Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta.....	78
Tabel 5.1	: Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019....	108



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020.....	8
Grafik 2.2. : Klasifikasi perkara pidana biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020.....	9
Grafik 2.3. : Klasifikasi perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020	10
Grafik 2.4. : Klasifikasi perkara perdata di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020	10
Grafik 2.5. : Klasifikasi perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020.....	11
Grafik 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	30
Grafik 3.2 : Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	32
Grafik 3.3 : Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020	32
Grafik 4.1 : Peningkatan Perkara Masuk melalui E-Court pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020.....	77
Grafik 5.1 : Peningkatan Nilai LKjIP pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2016-2019	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Sosialisasi dan pelaksanaan Swab/ Rapid Antigen Tahun 2020 Di PT Yogyakarta	65
Gambar 4.2	: Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Gedung PT Yogyakarta	65
Gambar 4.3	: Pemasangan Akrilik pada PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta	66
Gambar 4.4	: Pengecekan suhu tubuh dengan alat Thermogun	68
Gambar 4.5	: Pemasangan Washtafel dan sabun cuci tangan	68
Gambar 4.6	: Penyediaan dan Pemasangan Handsanitizer	69
Gambar 4.7	: Pemasangan Droplet Protektor atau Penyekat Akrilik PTSP dan Ruang Sidang.....	69
Gambar 4.8	: Pemasangan Kursi Berjarak Pada Lobi dan Ruang Tunggu.....	70
Gambar 4.9	: Melakukan Penyemprotan Desinfektan Di Semua Bagian Pengadilan	70
Gambar 4.10	: Desinfektan Aerosol Untuk Berkas Perkara	71
Gambar 4.11	: Sarana Edukasi Seperti Leaflet, Banner Dan Poster	71
Gambar 4.12	: Pelaksanaan Rapid Test dan Swabtest di Pengadilan Negeri	71
Gambar 4.13	: Pelaksanaan Persidangan Secara Daring/Online	72
Gambar 4.14	: Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta	75
Gambar 4.15	: Pojok e-court corner Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta .	77
Gambar 4.16	: Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri.....	78
Gambar 4.16	: Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding	79
Gambar 4.17	: Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama	80
Gambar 4.18	: Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama	80
Gambar 4.19	: Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi semua Peradilan	81
Gambar 4.20	: Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi semua Peradilan	81
Gambar 4.21	: Tampilan Web Aplikasi Monev SMART bagi semua Peradilan	82
Gambar 4.22	: Tampilan Web Aplikasi SIMPONI	83
Gambar 4.22	: Tampilan Web Aplikasi OMSPAN	83
Gambar 4.22	: Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39	84
Gambar 4.22	: Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu	84
Gambar 5.1	: Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta	87
Gambar 5.2	: Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta	89
Gambar 5.3	: Aplikasi SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	90
Gambar 5.4	: Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	91

Gambar 5.5	: Ruang Media Center Pengadilan Negeri Wates dan Sleman	91
Gambar 5.6	: Tampilan Inovasi Layanan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta	92
Gambar 5.7	: Inovasi Locket konfirmasi dan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Bantul.....	92
Gambar 5.8	: Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Yogyakarta	93
Gambar 5.9	: Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wates.....	94
Gambar 5.10	: Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Bantul.....	94
Gambar 5.11	: Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Sleman.....	94
Gambar 5.12	: Inovasi Co-working Space di Pengadilan Negeri Bantul.....	94
Gambar 5.13	: Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates.....	95
Gambar 5.14	: Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	95
Gambar 5.15	: Ruang Edukasi Anak di Pengadilan Negeri Wates dan Sleman	96
Gambar 5.16	: Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wates dan Sleman...	96
Gambar 5.17	: Inovasi Pojok Baca dan Media Edukasi di PN Yogyakarta dan PN Wates	97
Gambar 5.18	: Inovasi Aplikasi E-tilang di Pengadilan Negeri Bantul	98
Gambar 5.19	: Inovasi Syarat layanan di Pengadilan Negeri Bantul	98
Gambar 5.20	: Inovasi Warung kejujuran di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman.	99
Gambar 5.21	: Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates	99
Gambar 5.22	: Inovasi Mext SIPP di Pengadilan Negeri Wates.....	99
Gambar 5.23	: Inovasi Avatar di Pengadilan Negeri Wates	100
Gambar 5.24	: Inovasi Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) di Pengadilan Negeri Wates.....	101
Gambar 5.25	: Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	102
Gambar 5.26	: Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta	103
Gambar 5.27	: Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wates.....	103
Gambar 5.28	: Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sleman.....	103
Gambar 5.29	: Fasilitas e-Bezoek Drive Thru di Pengadilan Negeri Yogyakarta	104
Gambar 5.30	: Fasilitas e-Permohonan Informasi Akademisi di Pengadilan Negeri Yogyakarta	105
Gambar 5.31	: Fasilitas e-Permohonan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta	106
Gambar 5.32	: Fasilitas e-Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan *pilot project* reformasi birokrasi sejak tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun program dan kebijakan serta mengimplementasikan secara terus menerus pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan yang Agung (*Court of Excellent*) diantaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung serta dilakukannya Akreditasi Penjaminan Mutu dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Dengan tujuan yang sama, berbagai Regulasi juga telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatur secara teknis, antara lain SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.



Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi pastinya sedikit banyak menghadapi kendala/rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa masalah yang menyerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas sejak tahun 2017. Dalam upaya untuk menyelesaikan dan mencegah berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan perkantoran dan memaksimalkan kesiapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktian kepada publik bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 baik bagi hakim dan ASN maupun lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan beberapa kegiatan untuk melaksanakan core bisnis peradilan serta penyediaan sarana prasarana pencegahan virus covid-19. Kegiatan untuk melaksanakan core bisnis peradilan yaitu dengan melakukan peradilan elektronik.

Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, hal ini dilakukan sesuai dengan beberapa regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung dalam bentuk SEMA maupun PERMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran **Corona Virus Disease** 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanisme pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO).



2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tataan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (*new normal*) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.
3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tataan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.
4. Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukkan fitur *e-Litigasi*.
5. Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip *Fiat Justitia Ruat Caelum* yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.
6. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau *e-Court* serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur beberapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa melalui *teleconference*, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan



penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

7. Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekaman pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Pada tahun 2020 ini walaupun dalam masa pandemic covid-19, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan pedoman pemeliharaan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum telah melakukan Surveilans / Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu pada 2 (dua) Pengadilan Negeri kelas IB yaitu Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Bantul, 1 (satu) Pengadilan Negeri kelas II yaitu Pengadilan Negeri Wonosari serta melakukan pendampingan asesmen untuk 2 (dua) Pengadilan Negeri kelas IA yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, untuk melihat penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

Hal tersebut merupakan sebagian dari penerapan Kebijakan dan Regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri dibawahnya yang semata-mata untuk mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi:



1. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Klas IA
2. Pengadilan Negeri Sleman Klas IA
3. Pengadilan Negeri Bantul Klas IB
4. Pengadilan Negeri Wates Klas IB
5. Pengadilan Negeri Wonosari Klas II

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kompilasi dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi stakeholder yang telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta sebagai bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terlibat dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya.

Satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bambang Surono, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suparno, BA.

Didalam operasionalnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralamat di Jl. Trikora No. 1980 Yogyakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama kali yaitu Bapak Surono S.H. kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jl. Prof. DR. Soepomo No.10 Yogyakarta. Pada saat gempa menguncang Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2010, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung



baru untuk melaksanakan semua Tugas Pokok dan Fungsinya yang beralamatkan di Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 166/KEP/2017 Tentang Penamaan Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta, Alamat Pengadilan Tinggi Yogyakarta berubah menjadi Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., telah diresmikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2017 dan telah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta.

C. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
4. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang.

D. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang lebih rinci pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.



E. Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat sasaran strategis yang menjadi prioritas rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di atas serta untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Access To Justice*).
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan pelayanan informasi publik.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
8. Peningkatan kualitas perencanaan.
9. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
10. Peningkatan layanan kepegawaian.
11. Peningkatan pengelolaan keuangan.
12. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan teknologi informasi.



BAB II MANAJEMEN PERADILAN UMUM

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

Gambaran umum penanganan perkara peradilan umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Keadaan perkara peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2020

No	Pengadilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2020
1	PT Yogyakarta	45	208	253	-	216	37
2	PN Yogyakarta	147	19.569	19.716	13	19.525	178
3	PN Sleman	200	38.734	38.934	73	38.612	249
4	PN Wates	53	278	331	6	283	42
5	PN Bantul	137	11.899	12.036	-	11.926	110
6	PN Wonosari	62	5330	5.392	6	5331	55
Jumlah		644	76.018	76.662	98	75.893	671

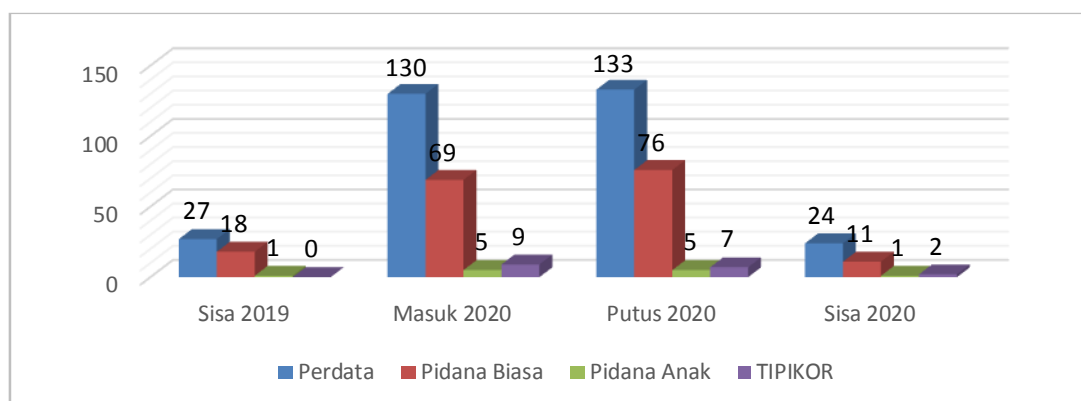
1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020, yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.2 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara pidana khusus Tipikor.

Tabel 2.2. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk Tahun 2020	Beban 2020	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020
1	Perkara Perdata	27	130	157	133	24
2	Perkara Pidana Biasa	18	69	87	76	11
3	Perkara Pidana Anak	1	5	6	5	1
4	Perkara TIPIKOR	-	9	9	7	2
Jumlah		46	213	259	221	38

Grafik 2.1. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020



a. Keadaan Perkara Pidana Biasa

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

- 1. Sisa Tahun lalu (2019) : 18 perkara
- 2. Masuk Tahun 2020 : 69 perkara
- 3. Putus Tahun 2020 : 76 perkara
- 4. Sisa akhir Tahun 2020 : 11 perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

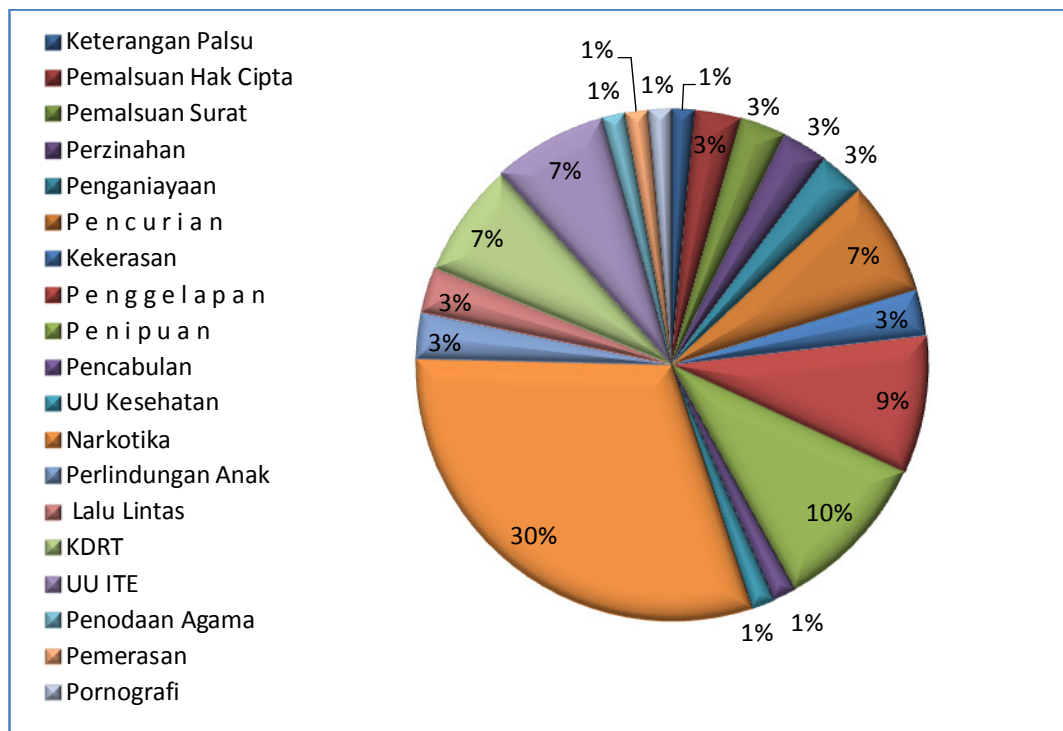
- 1. Putus Paling lama 1 bulan : 18 perkara
- 2. Putus 1 s/d 2 bulan : 53 perkara
- 3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : 5 perkara

Isi amar putusan perkara pidana biasa

- 1. Menguatkan : 49 perkara
- 2. Membatalkan : 6 perkara
- 3. Memperbaiki : 21 perkara
- 4. Dicabut : - perkara
- 5. Gugur : - perkara

Keadaan Perkara Pidana Biasa berdasarkan klasifikasi perkara :

Grafik 2.2. : Klasifikasi perkara pidana biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020



b. Keadaan Perkara Pidana Anak

- 1. Sisa Tahun lalu (2019) : 1 perkara
- 2. Masuk Tahun 2020 : 5 perkara
- 3. Putus Tahun 2020 : 5 perkara
- 4. Sisa akhir Tahun 2020 : 1 perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak

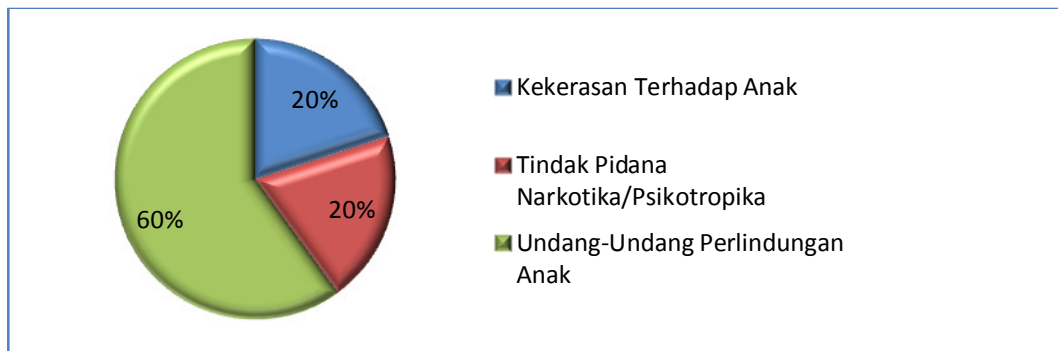
- Putus kurang dari 1 bulan : 5 perkara

Isi Amar putusan akhir Perkara Pidana Anak

- Menguatkan : 4 perkara
- Memperbaiki : 1 perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.3. : Persentase perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020

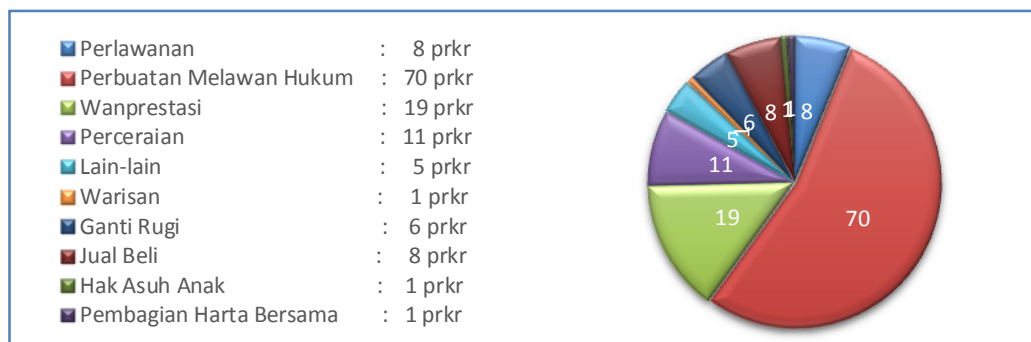


c. Keadaan Perkara Perdata

- 1. Sisa perkara tahun 2019 : 27 perkara
- 2. Perkara masuk tahun 2020 : 130 perkara
- 3. Perkara putus tahun 2020 : 133 perkara
- 4. Sisa tahun 2020 : 24 perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.4. : Jumlah Perkara perdata berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020

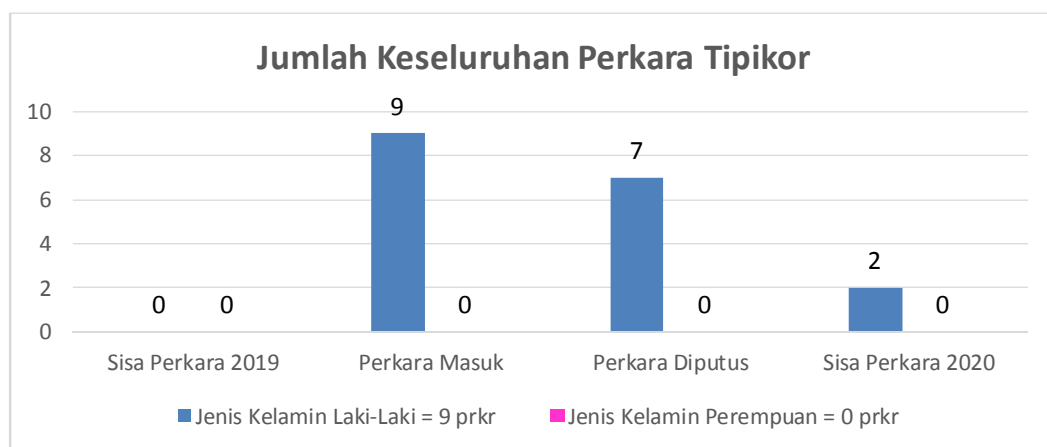


d. Keadaan Perkara TIPIKOR

1. Sisa Perkara Tahun 2019 : 0 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2020 : 9 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2020 : 7 Perkara
4. Sisa Perkara Tahun 2020 : 2 Perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.5. : Klasifikasi perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020



2. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam kondisi pandemi karena merebaknya penyebaran wabah virus Corona Virus Disease 19 (Covid-19), tak dipungkiri hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia, termasuk lembaga peradilan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada jajaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya. Hal ini bisa terlihat dari bertambahnya jumlah sisa perkara terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan umum di wilayah Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.3. : Keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama se D.I. Yogyakarta tahun 2020

No	Pengadilan	Sisa 2019	TAHUN 2020				
			Masuk 2020	Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1	PN Yogyakarta	147	19.569	19.716	13	19.525	178
2	PN Sleman	200	38.734	38.934	73	38.612	249
3	PN Wates	53	278	331	6	283	42
4	PN Bantul	137	11.899	12.036	-	11.926	110
5	PN Wonosari	62	5330	5392	6	5331	55
JUMLAH		599	75.810	76.409	98	75.677	634

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa keseluruhan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 sebanyak 75.810 perkara. Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 599 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2020 sebanyak 76.409 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 75.677 perkara dan sebanyak 98 perkara dicabut oleh para pihak sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2020 sebanyak 631 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2020 dibanding sisa perkara tahun 2019 meningkat sebanyak 32 perkara atau 5,5%. Rincian keadaan perkara tingkat pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana penjelasan dibawah ini :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	54	192	246	9	166	72
Perdata Permohonan	13	282	295	2	267	26
Gugatan Sederhana	-	10	10	-	10	-
Perlawanan/Derden Verzet	-	8	8	2	3	4
PHI	2	23	25	-	12	13
Jumlah	69	515	584	13	458	114
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	93	330	423	36	246	117
Perdata Permohonan	12	353	365	30	318	17
Gugatan Sederhana	4	14	18	7	10	1
Perlawanan/Derden Verzet	1	-	1	-	1	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	110	697	807	73	575	135
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	14	36	50	1	37	12
Perdata Permohonan	6	67	73	4	64	5
Gugatan Sederhana	13	6	19	1	16	2
Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	33	109	142	6	117	19

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	56	113	169	-	133	56
Perdata Permohonan	19	364	383	-	375	8
Gugatan Sederhana	8	51	59	-	57	2
Perlawanan/Derden Verzet	-	1	1	-	1	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	83	529	612	-	566	66
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	15	49	64	-	52	12
Perdata Permohonan	2	151	153	3	153	-
Gugatan Sederhana	-	13	13	-	13	-
Perlawanan/Derden Verzet	-	1	1	-	1	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	33	109	142	6	117	19

b. Perkara Pidana

Tabel 2.5. : Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	65	335	400	-	338	62
Pidana Singkat	-	1	1	-	1	-
Pidana Cepat	-	292	292	-	292	-
Lalu lintas	-	18.397	18.397	-	18.397	-
Tindak Pidana Korupsi	8	7	15	-	15	-
Pidana Anak	5	21	26	-	23	3
Pidana Praperadilan	-	1	1	-	1	-
Jumlah	78	19.054	19.132	0	19.067	65
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	90	609	699	-	609	90
Pidana Singkat	-	8	8	-	8	-
Pidana Cepat	-	45	45	-	45	-
Lalu lintas	-	37.349	37.349	-	37.349	-
Pidana Anak	-	21	21	-	21	-
Praperadilan	-	5	5	-	5	-
Jumlah	90	38.037	38.127	-	38.037	90

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	20	169	189	-	166	23
Pidana Singkat	-	59	59	-	59	-
Pidana Cepat	-	53	53	-	53	-
Lalu lintas	-	14.660	14.660	-	14.660	-
Pidana Anak	-	10	10	-	10	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	20	169	189	-	166	23
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	53	318	371	-	308	63
Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	41	41	-	41	-
Lalu lintas	-	10.991	10.991	-	10.991	-
Pidana Anak	1	19	20	-	19	1
Pidana Praperadilan	-	1	1	-	1	-
Jumlah	54	11.370	11.424	-	11.360	64
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	29	154	183	-	147	36
Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	26	26	-	26	-
Lalu lintas	-	5.031	5.031	-	5.031	-
Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
Pidana Praperadilan	-	10	10	-	10	-
Jumlah	29	5.221	5.250	-	5.214	36

c. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

Tabel 2.6. : Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2020

Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
PN Yogyakarta	474	308.084.900	184	272	8	10	474
PN Sleman	696	1.394.839.000	329	353	-	14	696
PN Wates	85	48.385.000	33	43	1	6	83
PN Bantul	91	118.421.000	75	12	-	4	91
PN Wonosari	119	60.282.000	28	83	-	8	119
Jumlah	1.465	1.930.011.900	649	763	9	42	1.463

3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Perdata

Tabel 2.7 : Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	20	30	50	-	34	16
Perlawanan (Derden Verzet)	-	2	2	-	2	-
Jumlah	20	32	52	-	36	16
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	13	40	53	2	35	16
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13	40	53	2	35	16
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	-	8	8	-	6	2
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	8	8	-	6	2
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	4	26	30	-	24	6
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	26	30	-	24	6
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	1	7	8	-	8	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	7	8	-	8	-

b. Perkara Pidana

Tabel 2.8 : Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	5	17	22	1	19	2
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	3	3	-	2	1
Tindak Pidana Korupsi	-	10	-	-	-	10
Jumlah	5	30	25	1	21	13

Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	13	40	53	2	35	16
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	1	1	2	-	1	1
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	14	41	55	2	36	17
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	2	4	6	-	3	3
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	4	6	-	3	3
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	4	26	30	-	24	6
Pidana Cepat	-	1	1	-	1	-
Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	28	32	-	26	6
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	1	11	-	-	8	4
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	2	-	-	1	1
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	13	-	-	9	5

4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Perdata

Tabel 2.9 : Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	26	18	44	-	8	36
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	3	2	5	-	1	4
PHI	-	7	7	-	1	6
Jumlah	29	27	56	-	10	46
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	45	43	88	5	22	61
Perdata Permohonan	-	1	1	-	-	1
Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	2	-	1	1
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	46	45	91	5	23	63

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	5	3	8	-	4	4
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	3	8	-	4	4
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	3	16	19	1	3	15
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	16	19	1	3	15
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	1	5	6	-	-	6
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	5	6	-	-	6

b. Perkara Pidana

Tabel 2.10 : Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	11	13	24	2	9	13
Pidana Anak	-	2	2	-	-	2
Tindak Pidana Korupsi	3	7	10	-	2	8
Jumlah	14	22	36	2	11	23
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	51	28	79	-	25	54
Pidana Anak	1	1	2	-	2	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	52	29	81	-	27	54
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	1	2	3	-	2	1
Pidana Anak						
Tindak Pidana Korupsi						
Jumlah	1	2	3	-	2	1

Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	2	6	8	-	3	5
Pidana Anak	-	1	1	-	-	1
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	7	9	-	3	6
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	2	5	-	-	4	3
Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	5	-	-	4	3

5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Perdata

Tabel 2.11 : Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	4	4	8	-	1	7
Jumlah	4	4	8	-	1	7
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	6	4	10	-	3	7
Jumlah	6	4	10	-	3	7
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	2	-	2	-	2	-
Jumlah	2	-	2	-	2	-

b. Perkara Pidana

Tabel 2.12 : Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2020

Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	-	1	1	-	-	1
Tindak Pidana Korupsi	7	4	11	-	3	8
Jumlah	7	5	12	-	3	9
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	3	1	4	-	1	4
Jumlah	3	1	4	-	1	4
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	-	1	1	-	-	1
Jumlah	-	1	1	-	-	1
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diputus pada tahun 2020

a. Perkara Perdata

Tabel 2.13 : Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 Yang Diputus Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa 2019 di Cabut 2020	Sisa Perkara Yang Diputus 2020	Sisa Perkara 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perdata Gugatan	54	14	39	1
Perdata Permohonan	13	1	12	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-
Perlawanan/bantahan	1	-	1	-
Jumlah	68	16	52	1

Pengadilan Negeri Sleman				
Perdata Gugatan	93	8	85	-
Perdata Permohonan	12	-	12	-
Perdata Gugatan Sederhana	4	-	4	-
Perlawanan/bantahan	-	-	-	-
Jumlah	109	8	101	-
Pengadilan Negeri Wates				
Perdata Gugatan	14	-	14	-
Perdata Permohonan	6	-	6	-
Perdata Gugatan Sederhana	13	-	13	-
Perlawanan/bantahan	0	-	0	0
Jumlah	33	-	33	-
Pengadilan Negeri Bantul				
Perdata Gugatan	56	0	55	1
Perdata Permohonan	19	0	19	0
Perdata Gugatan Sederhana	8	0	8	0
Perlawanan/bantahan	-	-	-	-
Jumlah	83	0	82	1
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perdata Gugatan	15	-	15	-
Perdata Permohonan	2	-	2	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-
Perlawanan/bantahan	1	-	1	-
Jumlah	18	-	18	18

b. Perkara Pidana

Tabel 2.14 : Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 Yang Diputus Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa 2019 di Cabut 2020	Sisa Perkara Yang Diputus 2020	Sisa Perkara 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Pidana Biasa	65	-	65	-
Tipikor	8	-	8	-
Pidana Anak	6	1	5	-
Jumlah	79	1	78	-
Pengadilan Negeri Sleman				
Pidana Biasa	90	-	90	-
Tipikor	-	-	-	-
Pidana Anak	4	-	4	-
Jumlah	94	-	94	-

Pengadilan Negeri Wates				
Pidana Biasa	20	-	20	-
Tipikor	-	-	-	-
Pidana Anak	1	-	1	-
Jumlah	21	-	21	-
Pengadilan Negeri Bantul				
Pidana Biasa	53	-	53	-
Tipikor	-	-	-	-
Pidana Anak	1	-	1	-
Jumlah	54	-	54	-
Pengadilan Negeri Wonosari				
Pidana Biasa	29	-	29	-
Tipikor	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	-	-
Jumlah	29	-	29	-

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Diputus Tepat Waktu menurut SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2020 pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.15 : Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020

Jenis Perkara	Perkara Yg Dltangani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2019	Masuk 2020			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perdata Gugatan	54	192	122	122	-
Perdata Permohonan	13	288	275	275	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	10	10	10	-
PHI					
Perlawanan / Bantahan	1	1	1	1	-
Jumlah					
Pengadilan Negeri Sleman					
Perdata Gugatan	93	330	306	286	20
Perdata Permohonan	12	353	348	348	0
Perdata Gugatan Sederhana	4	14	17	17	0
Perlawanan / Bantahan	1	0	1	1	0
Jumlah					

Pengadilan Negeri Wates					
Perdata Gugatan	14	36	37	36	1
Perdata Permohonan	6	67	64	64	-
Perdata Gugatan Sederhana	13	6	16	16	-
Perlawanan / Bantahan			0	0	0
Jumlah					
Pengadilan Negeri Bantul					
Perdata Gugatan	55	113	133	133	0
Perdata Permohonan	19	364	375	375	0
Perdata Gugatan Sederhana	8	51	57	57	0
Perlawanan / Bantahan	0	1	1	1	0
PHI					
Jumlah					
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perdata Gugatan	15	52	52	51	1
Perdata Permohonan	2	151	153	-	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
Perlawanan / Bantahan	1	-	1	-	-
Jumlah					

b. Perkara Pidana

Tabel 2.16 : Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020

Jenis Perkara	Perkara Yg Ditungani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2019	Masuk 2020			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Pidana Biasa	65	335	338	336	2
Pidana Singkat	-	1	1	1	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	292	292	292	-
Pidana Lalu-Lintas	-	18.397	18.397	18.397	-
Tipikor	10	7	17	14	3
Pidana Anak	5	21	23	22	1
Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-
Jumlah	80	19053	19068	19062	6
Pengadilan Negeri Sleman					
Pidana Biasa	90	609	609	607	2
Pidana Singkat	-	8	8	5	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	45	45	45	-
Pidana Lalu-Lintas	-	37.349	37.349	37.349	-

Tipikor	-	-	-	-	-
Pidana Anak	4	21	25	11	10
Pidana Praperadilan	-	5	5	5	-
Jumlah	94	38037	38041	38022	12
Pengadilan Negeri Wates					
Pidana Biasa	20	169	166	166	-
Pidana Singkat	-	59	59	59	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	53	53	53	-
Pidana Lalu-Lintas	-	14.660	14.660	14.660	-
Tipikor	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	10	10	10	-
Pidana Praperadilan	-	-	1	1	-
Jumlah	20	14951	14949	14949	-
Pengadilan Negeri Bantul					
PHI					
Pidana Biasa	53	318	308	308	-
Pidana Singkat	-	-	-	-	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	41	41	41	-
Pidana Lalu-Lintas	-	10991	10991	10991	-
Tipikor	-	-	-	-	-
Pidana Anak	1	19	19	19	-
Pidana Praperadilan	-	1	1	1	-
Jumlah	54	11370	11360	11360	-
Pengadilan Negeri Wonosari					
Pidana Biasa	29	154	147	-	-
Pidana Singkat	-	-	-	-	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	26	26	-	-
Pidana Lalu-Lintas	-	5031	5031	-	-
Tipikor	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	10	10	-	-
Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-
Jumlah	29	5221	5214	-	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

a. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020.

Tabel 2.17 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Putusan PN 2020 Contentius	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	28	191	34	185
Perkara Pidana	2	376	25	351
Jumlah	30	567	59	536
Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	110	589	55	617
Perkara Pidana	5	688	41	647
Jumlah	115	1277	96	1264
Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	-	117	8	109
Perkara Pidana	-	288	4	284
Jumlah	-	405	12	393
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	16	566	26	556
Perkara Pidana	54	316	9	361
Jumlah	70	882	35	917
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perkara Perdata	-	53	7	46
Perkara Pidana	10	183	13	180
Jumlah	10	236	20	226

b. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020.

Tabel 2.18 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Putusan Banding 2020	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	2	36	27	11
Perkara Pidana	4	28	19	13
Jumlah	6	64	46	24
Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	5	59	44	20
Perkara Pidana	44	36	26	54
Jumlah	49	95	70	74

Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	-	6	3	3
Perkara Pidana	-	3	2	1
Jumlah	-	9	5	4
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	10	24	16	18
Perkara Pidana	7	14	7	14
Jumlah	17	38	23	32
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perkara Perdata	-	8	5	3
Perkara Pidana	1	9	5	5
Jumlah	1	17	10	8

c. Akseptabilitas Putusan Kasasi

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020.

Tabel 2.19 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2020

Jenis Perkara	Putusan PN 2020 Yang Telah BHT	Putusan Banding 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan PK
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perkara Perdata	177	9	11	4	193
Perkara Pidana	349	5	14	5	363
Jumlah	526	14	25	9	556
Pengadilan Negeri Sleman					
Perkara Perdata	252	15	28	4	291
Perkara Pidana	600	11	25	1	635
Jumlah	752	26	53	5	926
Pengadilan Negeri Wates					
Perkara Perdata	117	5	4	-	123
Perkara Pidana	235	3	3	-	241
Jumlah	352	8	7	-	364
Pengadilan Negeri Bantul					
Perkara Perdata	191	24	3	-	218
Perkara Pidana	322	13	4	1	338
Jumlah	513	37	7	1	556
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perkara Perdata	48	3	-	2	49
Perkara Pidana	189	9	4	-	202
Jumlah	137	12	4	2	251

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang berhasil di mediasi pada tahun 2020.

Tabel 2.20 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2020

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
		Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
PN Yogyakarta	109	6	96	7	83
PN Sleman	172	10	161	1	135
PN Wates	19	3	14	1	1
PN Bantul	113	12	45	18	9
PN Wonosari	22	2	18	2	27
Jumlah	435	33	334	29	255

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang berhasil melalui diversi pada tahun 2020.

Tabel 2.21 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	21	3	-	3	-
2	Pengadilan Negeri Sleman	21	3	-	3	-
3	Pengadilan Negeri Wates	10	1	1	-	-
4	Pengadilan Negeri Bantul	19	19	2	17	-
5	Pengadilan Negeri Wonosari	10	1	1	-	-
Jumlah		81	27	4	23	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Tabel 2.22 : Statistik Posbakum Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Yogyakarta	AFTA	526	48.000.000	48.000.000	-
PN Sleman	LBH AFTA	321	31.200.000	31.200.000	-
PN Wates	LBH	312	31.200.000	31.000.000	200.000
PN Bantul	LBH	67	31.200.000	31.200.000	-
PN Wonosari	YLKBH Handayani	212	40.800.000	40.746.904	53.096
Jumlah		1.438	182.400.000	182.146.904	253.096

Menurut SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan :**

1. Memberikan Advis/Konsultasi Hukum kepada Masyarakat
2. Pembuatan Dokumen Hukum (Gugatan / Permohonan)
3. Pendampingan persidangan
4. Pembuatan Laporan Absensi Kehadiran
5. Pengisian Buku Konsultasi

- **Kendala yang dihadapi :**

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko terhadap penyuapan
3. Beberapa Advokat yang piket tidak menguasai materi hukum acara
4. Belum adanya system informasi posbakum, administrasi masih manual sehingga pengawasan dan monitoring masih manual
5. Masih sedikitnya pengunjung di posbakum, karena ketidaktahuan/ kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi advis hukum secara gratis di posbakum

6. Adanya perubahan aturan perundangan yang belum di sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

- **Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

1. Pembuatan Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuaipan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas
5. Konsultasi ke Panmud Perdata, Pidana dan Hukum
6. Mengoptimalkan sosialisasi tentang posbakum kepada masyarakat
7. Perlunya koordinasi lintas sektor / instansi / petugas Pusbakum khususnya dalam hal yang mengatur / terkait dengan kepentingan langsung masyarakat seperti bidang administrasi kependudukan, pertanahan dll.
8. Penyederhanaan regulasi / aturan agar tidak menyulitkan masyarakat.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.

Sehubungan dengan adanya wabah pandemi Corona Virus Dengue 19 (Covid 19) maka pada tahun anggaran 2020 ini tidak ada kegiatan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu. Kegiatan ini tidak dilakukan karena untuk mengendalikan / mencegah penularan Corona Virus Dengue 19 (Covid 19).

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Tabel 2.23 : Statistik Perkara Prodeo Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran
PN Yogyakarta	3 Perkara	1 Perkara	2.760.000	80.000	2.680.000
Jumlah	3 Perkara	1 Perkara	2.760.000	80.000	2.680.000

Dari lima Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah D.I. Yogyakarta, pada tahun anggaran 2020 ini hanya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mendapatkan anggaran untuk kegiatan penyelesaian Perkara Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara perdata dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2020 untuk target 3 (tiga) perkara dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.760.000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut hanya terealisasi 1 (satu) perkara yaitu Rp. 80.000,-, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.680.000,-. Tidak terserapnya secara maksimal anggaran penyelesaian Perkara Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara perdata ini disebabkan tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata secara prodeo yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Padahal dari Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui desa- desa akan tetapi tetap tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara melalui prodeo.

- **Kegiatan yang dilaksanakan :**

Penyelesaian perkara di tingkat pertama baik dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, mutasi, upaya hukum maupun eksekusi.

- **Kendala yang dihadapi :**

Pengguna layanan yang mendaftar perkara prodeo sangat sedikit, dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat sudah baik

- **Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

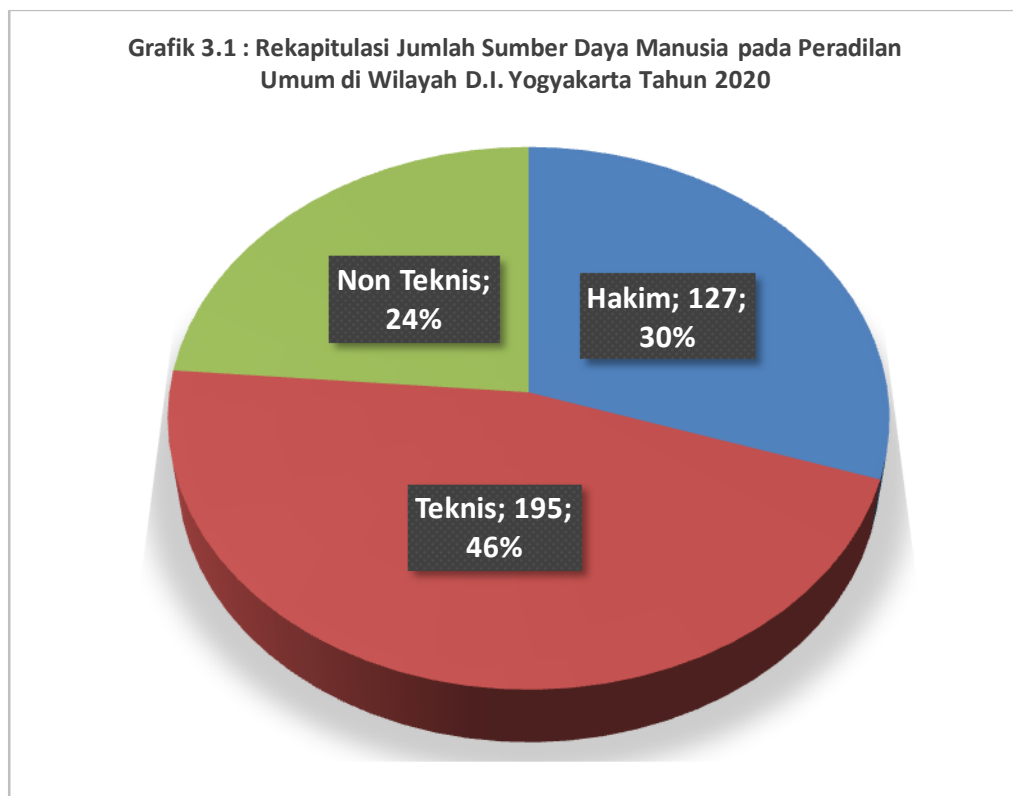
Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media masa maupun website.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :



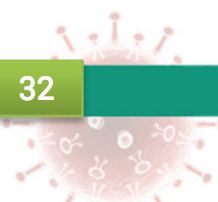
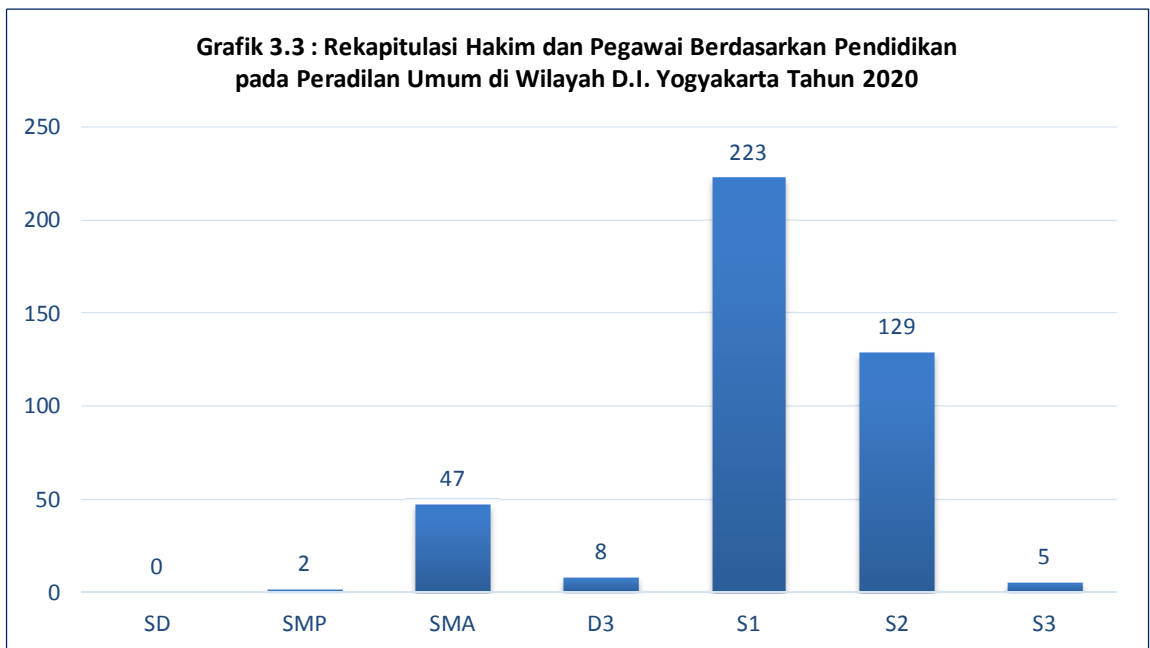
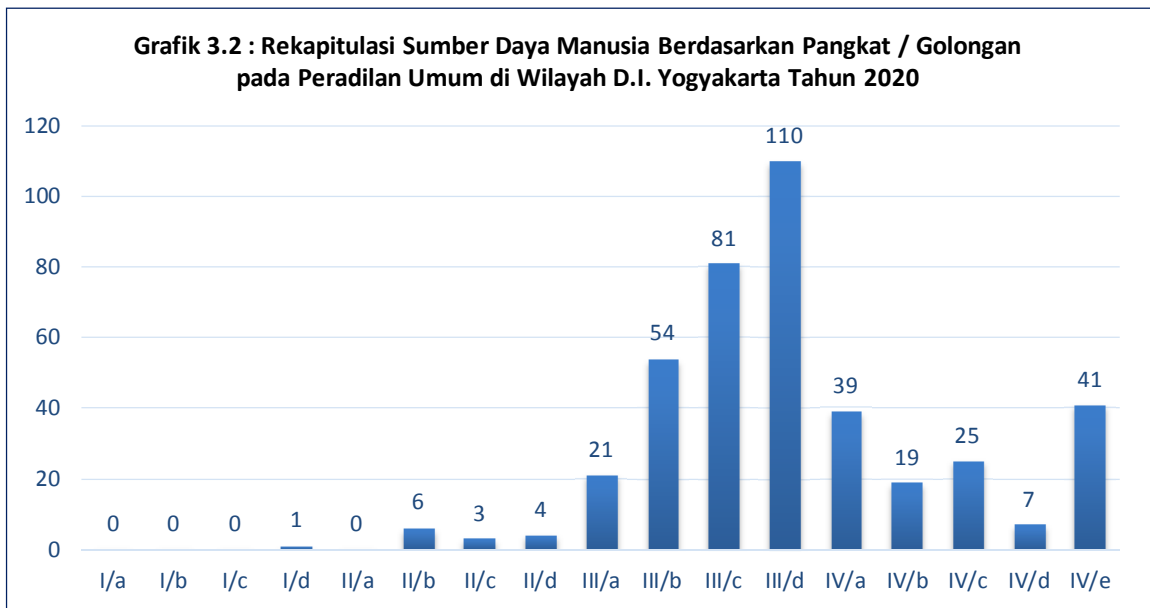
Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa keadaan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Hakim (127 Orang)						Teknis (195 Orang)					Non Teknis (100 Orang)				Jumlah
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Hakim Yustisial	Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Sekretaris	Ka Bagian	Ka Sub Bagian	Staf	
1	PT Yogyakarta	B	1	1	37	3		5	1	3	36			1	2	4	30	124
2	PN Yogyakarta	IA	1	1	25	5	3		1	5	25	6	8	1		3	11	95
3	PN Sleman	IA	1	1	20				1	3	20	7	9	0		3	11	76
4	PN Bantul	IB	1	0	7				1	3	14	4	5	1		3	9	48
5	PN Wates	IB	1	1	6				1	3	9	4	8	1		3	7	44
6	PN Wonosari	II	1	1	5				1	3	7	3	4	1		3	6	35
Jumlah			6	5	100	8	3	5	6	20	111	24	34	5	2	19	74	422

Keterangan : Untuk Jabatan Panitera Muda Perdata kosong sejak 21 Agustus 2020 karena pejabat terakhir meninggal dunia dan belum ada penggantinya.

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :



1. Mutasi

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
			Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	9	7	3	19	-	1	1	2
2	PN Yogyakarta	IA	6	4	2	12	5	5	3	13
3	PN Sleman	IA	5	3	-	8	-	4	-	4
4	PN Bantul	IB	1	1	-	2	2	1	1	4
5	PN Wates	IB	1	6	-	7	3	3	-	6
6	PN Wonosari	II	3	1	-	4	3	1	1	5
Jumlah			25	22	5	52	13	15	6	34

2. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Promosi Sebagai							Jumlah
			Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekretaris	Panmud	Kasub bag	PP	
1	PT Yogyakarta	B	-	-	-	-	-	-	-	0
2	PN Yogyakarta	IA	1	-	-	-	3	1	5	10
3	PN Sleman	IA	-	-	-	-	1	-	1	2
4	PN Bantul	IB	1	-	-	-	3	-	1	5
5	PN Wates	IB	1	1	1	-	1	-	1	5
6	PN Wonosari	II	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah			3	1	1	0	8	1	9	23

3. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	12	4	-	16
2	PN Yogyakarta	IA	6	2	-	8
3	PN Sleman	IA	3	-	-	3
4	PN Bantul	IB	1	-	-	1
5	PN Wates	IB	2	1	-	3
6	PN Wonosari	II	3	-	-	3
Jumlah			27	7	-	34

4. Diklat

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2020 terdiri dari Diklat yang dilaksanakan secara daring maupun secara langsung. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Jenis Diklat						Jumlah
			Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Pra Jabatan	Diklat Lain-Lain	
1	PT Yogyakarta	B	-	1	43	-	-	5	49
2	PN Yogyakarta	IA	-	3	59	2	-	3	67
3	PN Sleman	IA	-	1	6	1	-	4	12
4	PN Bantul	IB	1	1	10	-	-	-	12
5	PN Wates	IB	-	-	3	-	-	-	3
6	PN Wonosari	II	-	2	2	-	-	7	11
Jumlah			1	8	123	3	0		154

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran Belanja

Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, yaitu :

1. DIPA-005.01.2.400342/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan 2 (dua) Program Kerja yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.218.810.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
2. DIPA-005.03.2.400343/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan 1 (satu) Program kerja yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 190.525.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan alokasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 adalah Rp. 36.409.335.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp..36.387.671.779,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan serapan sebesar 99,94.%.

Sedangkan untuk seluruh satker Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 50.432.355.000,- (lima puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.. 50.081.882.582,- (Lima puluh milyar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 99,31%, sehingga jumlah alokasi seluruhnya untuk wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan satker dibawahnya sebesar Rp. 86.841.690.000,- (delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 86.469.554.361,- (delapan puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sehingga daya serap sebesar 99.57%.

- a. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Dan PN Se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			KENAIKAN/ PENURUNAN REALISASI
		PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
	B. Pegawai	78.045.271.000	77.789.033.279	99,67	74.873.088.000	74.681.120.047	99,74	0,07
	B. Barang Opr	8.298.821.000	8.171.024.168	98,46	10.346.650.000	10.233.495.132	98,91	0,45
	B. Barang Non Opr	94.740.000	86.829.859	91,65	229.958.000	229.904.601	99,98	8,33
	B. Modal	659.500.000	657.076.386	99,63	269.335.000	266.001.380	98,76	-0,87
	Jumlah 01	87.098.332.000	86.703.963.692	99,55	85.719.031.000	85.410.521.160	99,64	0,09
	B. Barang (03)	1.090.444.000	1.074.195.317	98,51	1.122.659.000	1.059.033.201	94,33	-4,18
	Jumlah 03	1.090.444.000	1.074.195.317	98,51	1.122.659.000	1.059.033.201	94,33	-4,18
	Jumlah 01 + 03	88.188.776.000	87.778.159.009	99,53	86.841.690.000	86.469.554.361	99,57	0,04

- b. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA								
	B. Pegawai	35.279.775.000	35.262.861.321	99,95	16.913.679	32.853.739.000	32.833.297.870	99,94	20.441.130
	B. Barang Opr	2.027.595.000	2.013.650.538	99,31	13.944.462	3.030.778.000	3.030.563.408	99,99	214.592
	B. Barang Non Opr	37.700.000	37.300.000	99,94	400.000	229.958.000	229.904.601	99,98	53.399
	B. Modal	209.500.000	208.144.000	99,35	1.356.000	104.335.000	103.840.000	99,53	495.000
	Jumlah 01	37.554.570.000	37.521.955.859	99,91	32.614.141	36.218.810.000	36.197.605.879	99,94	21.204.121
	B. Barang (03)	108.585.000	102.787.300	94,66	5.797.700	190.525.000	190.065.900	99,76	459.100
	Jumlah 03	108.585.000	102.787.300	94,66	5.797.700	190.525.000	190.065.900	99,76	459.100
	Jumlah 01 + 03	37.663.155.000	37.624.743.159	99,90	38.411.841	36.409.335.000	36.387.671.779	99,94	21.663.221

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Walaupun pagu belanja pegawai sudah dilakukan pengurangan secara signifikan, tetapi di tahun 2020 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.441.130,- untuk alokasi belanja uang makan pegawai, dimana pada akhir bulan banyak pegawai yang menjalani cuti tahunan.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional telah dilakukan penyerapan anggaran secara maksimal sehingga hanya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 214.592,-. Meskipun jumlah alokasi pagu anggaran belanja barang operasional tahun 2020 naik dibanding tahun 2019 tetapi hal ini telah diimbangi dengan optimalisasi realisasi anggaran.

3. Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang Non operasional telah dilakukan penyerapan anggaran secara maksimal sehingga hanya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 53.399,-. Meskipun jumlah alokasi pagu anggaran belanja barang non operasional tahun 2020 naik secara signifikan dibanding tahun 2019 tetapi hal ini telah diimbangi dengan optimalisasi realisasi anggaran.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal tahun anggaran 2020 masih menyisakan anggaran sebesar Rp 495.000,- karena optimalisasi penyerapan anggaran.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan DIPA 03

Belanja Barang

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 459.100,- dalam manajemen peradilan DIPA 03 Badan Peradilan Umum karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara, dimana perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020 berada dibawah target penyelesaian perkara dalam DIPA 03.

- c. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA								
	B. Pegawai	17.049.196.000	17.029.410.980	99,88	38.424.231	16.950.059.000	16.874.147.661	99,55	75.909.339
	B. Barang Opr	2.076.205.000	2.032.707.396	97,0	43.497.604	2.418.659.000	2.353.673.789	97,31	64.985.211
	B. Barang Non Opr	25.200.000	25.200.000	100	0	-	-	-	-
	B. Modal	137.500.000	137.500.000	100	0	25.000.000	24.600.960	98,40	399.040
	Jumlah 01	19.288.101.000	192.224.818.376	99,66	63.282.624	19.393.718.000	19.252.424.410	99,27	141.293590
	B. Barang (03)	289.704.000	284.646.000	98,25	5.058.000	269.654.000	265.896.557	98,61	2.680.000
	Jumlah 03	289.704.000	284.646.000	98,25	5.058.000	269.654.000	265.896.557	98,61	2.680.000
	Jumlah 01 + 03	19.577.805.000	19.509.464.376	99,65	68.340.624	19.663.372.000	265.896.557	98,61	2.680.000

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 75.909.339,00 untuk belanja pegawai karena Sisa Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc yang diperkirakan pensiun, namun SK diperpanjang.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 64.985.211,00 untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. Sisa Belanja Pemeliharaan Gedung

2. Sisa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

dikarenakan estimasi pengambilan tambahan uang persediaan (TUP) tidak mencukupi sampai dengan keseluruhan kebutuhan.

3. Belanja Barang Operasional

Tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Belanja Barang Non Operasional

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 399.040,00 untuk belanja modal karena ongkos kirim belanja modal gratis dan sisa pagu tidak bisa direvisi ke akun lain.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 5.058.000,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

A. 1049.005.004 Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama:

1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 72.750,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .

2. 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 10.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .

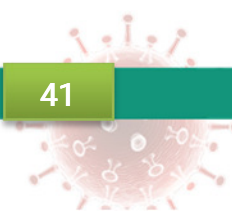
3. 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 82.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan.

4. 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 12.080,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .

5. 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 46.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
6. 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 13.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
7. 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 97.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
8. 1049.005.006.058 : Dalam belanja Penanganan Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 83.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

B. 1049.005.004 Perkara Tipikor yang diselesaikan di tingkat Pertama:

1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 49.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
2. 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 20.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .
3. 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 8.487,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan.
4. 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 46.220,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan.
5. 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
6. 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 78.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
7. 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 49.101,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
8. 1049.005.006.058 : Dalam belanja Penanganan Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 2.800,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.



C. 1049.005.004 Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat Pertama:

1. 1049.005.004.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 7.900,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan.
2. 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 54.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .
3. 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 30.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan.
4. 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 60.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
5. 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 105.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
6. 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 65.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
7. 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 65.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

D. 1049.006. Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta:

1. 1049.006.004.051 : Dalam belanja Biaya Perkara sebesar Rp 2.030.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi perkara Prodeo yang diajukan sehingga tidak ada Belanja Bahan, Barang Persediaan Konsumsi maupun perjalanan dinas dalam kota yang direalisasikan.
2. 1049.006.004.052 : Dalam belanja Biaya Eksekusi sebesar Rp 650.000,00 karena tidak ada perkara eksekusi yang diajukan secara Prodeo.

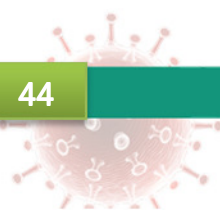
- d. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Sleman Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Sleman
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
2	PENGADILAN NEGERI SLEMAN								
	B. Pegawai	10.045.496.000	10.034.529.676	99,89	10.966.324	10.838.174.000	10.804.797.894	99.69	33.376.106
	B. Barang Opr	1.302.184.000	1.276.365.145	98,01	24.818.855	1.510.972.000	1.507.377.520	99.76	3.594.480
	B. Barang Non Opr	1.000.000	1.000.000	100	-	0	0	0	0
	B. Modal	112.500.000	112.132.386	99,67	367.614	65.000.000	63.259.460	97.32	1.740.540
	Jumlah 01	11.461.180.000	11.424.027.207	99,68	36.152.793	12.414.146.000	12.375.434.874	99.69	38.711.126
	B. Barang (03)	321.925.000	321.124.687	99,75	800.313	331.950.000	326.511.025	98.36	5.438.975
	Jumlah 03	321.925.000	321.124.687	99,75	800.313	331.950.000	326.511.025	98.36	5.438.975
	Jumlah 01 + 03	11.783.105.000	11.745.151.894	99,68	36.953.106	12.746.096.000	12.701.945.899	99,65	88.300.202

Keterangan :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
 1. Belanja Pegawai
Terdapat selisih penyerapan anggaran sebesar 0,10% dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena perhitungan pagu minusnya lebih baik pada tahun 2019.
 2. Belanja Barang Operasional
Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 1,52% untuk belanja barang operasional karena semua belanja barang operasional terserap dengan baik, sesuai dengan perencanaan.
 3. Belanja Barang Non Operasional
Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 4,41 % untuk belanja barang non operasional karena berkurangnya anggaran perjalanan dinas, anggaran perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi masuk ke Belanja Barang Operasional.
- b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Belanja Modal
Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,19% untuk belanja modal tahun 2020.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Belanja Barang
Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 2,09% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum) karena penurunan jumlah konsumsi terdakwa dan perkara prodeo pada tahun 2020.



- e. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Wates Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wates Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	PENGADILAN NEGERI WATES								
	B. Pegawai	5.589.013.000	5.485.176.349	98,27	103.836.651	5.129.303.000	5.116.782.217	99,76	12.520.983
	B. Barang Opr	950.176.000	942,762,795	99,22	7,413,205	1.118.1800000	1.096.972.533	98,10	21.207.467
	B. Barang Non Opr	14.400.000	12,974,100	90,10	1.245.900	-	-	-	-
	B. Modal	62.500.000	62.500.000	100	0	25.000.000	24.900.480	99,60	99.520
	Jumlah 01	6.616.089.000	6.503.413.244	98,41	112.675.756	6.272.483.000	6.238.655.230	99,46	33.827.770
	B. Barang (03)	127.440.000	126,227,000	99,05	1,213,000	98.130.000	76.425.500	77,88	21.704.500
	Jumlah 03	127.440.000	126.227.000	99,05	1.213.000	98.130.000	76.425.500	77,88	21.704.500
	Jumlah 01 + 03	6.743.529.000	6.629.640.244	98,31	113.888.756	6.370.613.000	6.315.080.730	99,2	55.532.270

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 12.520.983,- (*dua belas juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*) untuk belanja pegawai karena terdapat Hakim dan Pegawai yang mutasi keluar lebih banyak dari pada Hakim dan Pegawai yang mutasi masuk.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 21.207.467,- (*dua puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) untuk Belanja Barang Operasional karena :

- a) Perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- b) Anggaran untuk Covid-19 terbatas tidak mencukupi untuk Swab sehingga hanya untuk masker, face shield, handsanitizer dan disinfektan mengakibatkan sisa anggaran.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

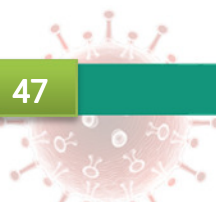
Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 99.520,- (*Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) untuk belanja modal karena dilakukan negosiasi dari harga yang tertera di e-catalog lkpp sehingga mendapatkan efisiensi penurunan harga.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 21.704.500- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja Jasa Advokat Piket Posbakum sebesar Rp. 200.000,-
karena jadwal piket memang sudah terpenuhi.
- 2 1049.005.005.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp. 2.376.000,-
karena perkara yang masuk lebih sedikit dari estimasi.
- 3 1049.005.005.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp. 6.500.000,-
karena volume perkara yang menurun.
- 4 1049.005.005.053 : Dalam belanja Pemeriksaan Disidang Pengadilan sebesar Rp. 1.075.000,-
karena sidang dilakukan secara online .
- 5 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi dan Upaya Hukum sebesar Rp. 7.560.000,-

- karena volume perkara yang masuk menurun.
- 6 1049.005.005.055 : Dalam belanja Pengiriman Salinan/Petikan Putusan sebesar Rp. 2.730.000,-
karena Volume perkara masuk menurun.
- 7 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan sebesar Rp. 420.000,-
karena volume perkara masuk menurun.
- 8 1049.005.005.057 : Dalam belanja penanganan perkara banding sebesar Rp. 239.500,-
karena volume perkara banding masuk menurun.
- 9 1049.005.005.058 : Dalam belanja penanganan perkara Kasasi/PK sebesar Rp. 604.000,-
karena volume perkara Kasasi/PK masuk menurun.



- f. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Bantul Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B								
	B. Pegawai	5.711.262.000	5.606.685.231	98,17	104.576.769	5.387.789.000	5.372.165.162	99,71	15.623.838
	B. Barang Opr	1.018.113.000	997.583.237	97,98	20.529.763	1.147.743.000	1.128.769.915	98,35	18.973.085
	B. Barang Non Opr	6.900.000	1.050.000	15,22	5.850.000	0	0	0	0
	B. Modal	87.500.000	86.800.000	99,20	700.000	25.000.000	24.500.000	98,00	500.000
	Jumlah 01	6.823.775.000	6.692.118.468	98,07	131.656.532	6.560.532.000	6.525.435.077	99,47	35.096.923
	B. Barang (03)	127.440.000	126.168.330	99,00	1.271.670	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790
	Jumlah 03	127.440.000	126.168.330	99,00	1.271.670	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790
	Jumlah 01 + 03	6.951.215.000	6.818.286.798	98,09	132.928.202	6.691.982.000	6.625.921.287	99,01	66.060.713

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 15.623.838,- untuk belanja pegawai karena sisa uang makan dimana banyak pegawai yang menjalankan cuti/ dinas luar/sakit sehingga tidak terbayarkan.

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 18.973.085,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. belanja perjalanan dinas yang tidak terbayarkan karena pandemi covid-19
2. sisa anggaran listrik
3. sisa anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin

3. Belanja Barang Non Operasional

Untuk tahun 2020, Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan pagu anggaran untuk belanja non operasional.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 500.000,- untuk belanja modal karena adanya perbedaan antara pagu dipa dengan harga pasar

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 30.963.790,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara (penggandaan/ penjilidan) sebesar Rp. 2.750.290,-. Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.
- 2 1049.005.004.053 : Dalam belanja pemeriksaan sidang pengadilan (konsumsi terdakwa dan pengamanan persidangan) sebesar Rp.24.890.000,- karena persidangan dilakukan secara daring, sehingga terdakwa tetap berada di rutan dan tidak ada pengamanan dari pengadilan
- 3 1049.005.004.054 : Dalam belanja Minutasi/upaa hukum (penjilidan) sebesar Rp. 15.900,- karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 4 1049.005.005.057 : Dalam belanja Penanganan perkara banding sebesar Rp3.280.000,- karena jumlah banding yang sedikit.
- 5 1049.005.004.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi sebesar Rp. 27.600,- karena tidak ada lagi tagihan terkaiti belanja ini di akhir desember.

- g. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Wonosari Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wonosari Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II								
	B. Pegawai	4.370.529.000	4.339.080.895	99,28	31.448.105	3.714.024.000	3.679.927.195	99,08 %	34.096.805
	B. Barang Opr	924.128.000	907.955.057	98,25	16.172.943	1.120.318.000	1.116.160.837	99,63 %	4.157.163
	B. Barang Non Opr	9.540.000	9.305.759	97,54	234.241	-	-	-	-
	B. Modal	50.000.000	50.000.000	100,00	0	25.000.000	24.900.480	99,60 %	99.520
	Jumlah 01	5.354.197.000	5.306.341.711	99,11	47.855.289	4.859.342.000	4.820.988.512	99,21 %	38.353.488
	B. Barang (03)	115.350.000	113.242.000	98,17	2.108.000	100.950.000	99.317.904	98,38 %	1.632.096
	Jumlah 03	115.350.000	113.242.000	98,17	2.108.000	100.950.000	99.317.904	98,38 %	1.632.096
	Jumlah 01 + 03	5.469.547.000	5.419.583.711	99,09	49.963.289	4.960.292.000	4.920.306.416	98,80 %	39.985.584

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 34.096.805,- untuk belanja pegawai karena sisa uang makan dimana banyak pegawai yang menjalankan cuti/ dinas luar/sakit sehingga tidak terbayarkan.

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 4.157.163,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. belanja perjalanan dinas yang tidak terbayarkan karena pandemi covid-19
2. sisa anggaran daya dan jasa

3. Belanja Barang Non Operasional

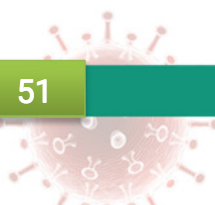
Untuk tahun 2020, Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan pagu anggaran untuk belanja non operasional.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal tahun anggaran 2020 masih menyisakan anggaran sebesar Rp 99.520,- karena optimalisasi penyerapan anggaran.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.632.096,- dalam manajemen peradilan DIPA 03 Badan Peradilan Umum karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara, dimana perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2020 berada dibawah target penyelesaian perkara dalam DIPA 03.



- h. Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran seluruh Satker di Wilayah D.I. Yogyakarta DIPA Badan Urusan Administras (01) dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03)

Tabel 4.8 : Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 01 Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

NO	SATKER	2019	2020	PROSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	99,91%	99,94%	0,03%
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	99,66%	99,27%	-0,39%
3	Pengadilan Negeri Sleman	99,68%	99,69%	0,01%
4	Pengadilan Negeri Wates	98,41%	99,46%	1,05%
6	Pengadilan Negeri Bantul	98,07%	99,47%	1,40%
5	Pengadilan Negeri Wonosari	99,11%	99,21%	0,10%

Tabel 4.9 : Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 03 Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

NO	SATKER	2019	2020	PROSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	94,66%	99,76%	5,10%
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	98,25%	98,61%	0,36%
3	Pengadilan Negeri Sleman	99,75%	98,36%	-1,39%
4	Pengadilan Negeri Wates	99,05%	77,88%	-21,17%
5	Pengadilan Negeri Bantul	99,00%	76,44%	-22,56%
6	Pengadilan Negeri Wonosari	98,17%	98,38%	0,21%

Secara umum prosentase penyerapan anggaran diseluruh Satker Se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami kenaikan untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01), tetapi pada DIPA Badan Peradilan Umum (03) terjadi penurunan penyerapan anggaran.

2. Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Rekapitulasi pagu awal anggaran belanja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta DIPA Badan Urusan Administras (01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) dijelaskan dibawah ini :

Tabel 4.10 : Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 01 BUA Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	2019	2020	KENAIKAN
PAGU AWAL		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	67.738.772.000	78.880.470.000	11.141.698.000
2	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON OPERASIONAL)	94.740.000	386.768.000	292.028.000
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	7.751.583.000	9.895.851.000	2.144.268.000
4	BELANJA MODAL	455.000.000	165.000.000	-290.000.000
	JUMLAH I	76.040.095.000	89.328.089.000	13.287.994.000
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH D.I. YOGYAKARTA DIPA 01				
PAGU MINUS		ABT 2019	ABT 2020	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	10.306.499.000	-4.007.382.000	-
	JUMLAH II	10.306.499.000	-4.007.382.000	-
TAMBAHAN ANGGARAN (ABT)		ABT 2019	ABT 2020	KENAIKAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON OPERASIONAL)	-	-156.810.000	-156.810.000
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	547.238.000	450.799.000	-96.439.000
3	BELANJA MODAL	204.500.000	104.335.000	-100.165.000
	JUMLAH III	751.738.000	398.324.000	-353.414.000
TOTAL (I + II + III) = PAGU AKHIR		87.098.332.000	85.719.031.000	-1.379.301.000

Tabel 4.11 : Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 03 BADILUM Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	2019	2020	KENAIKAN
PAGU AWAL		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	1.083.244.000	1.173.639.000	90.395.000
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH D.I. YOGYAKARTA DIPA 03				
TAMBAHAN ANGGARAN (ABT)		ABT 2019	ABT 2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	7.200.000	-50.980.000	-58.180.000
TOTAL (I + II + III) = PAGU REVISI		130.618.000	1.122.659.000	32.215.000

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020, Belanja Gaji dan Tunjangan tidak ada tambahan anggaran belanja karena anggaran untuk belanja ini mengalami surplus sehingga anggaran ini dipotong untuk dialokasikan kepada satker yang mengalami pagu minus belanja pegawai. Untuk belanja barang operasional mendapat anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 450.799.000,-, sedangkan untuk anggaran tambahan belanja modal sebesar Rp. 104.335.000,-

Sedangkan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) tidak ada alokasi ABT untuk tahun anggaran 2020 ini, tetapi justru ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 50.980.000,-

3. Anggaran Pencegahan dan Penanganan COVID-19

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meminta Kementerian / Lembaga untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol penanganan.

Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya Pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan.

Kemudian, Inpres ini juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas dan mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

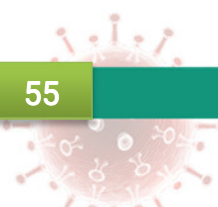
Sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersama jajaran Pengadilan Negeri dibawahnya telah mengambil langkah yang pasti dalam melaksanakan refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19.

Langkah ditempuh sesuai dengan regulasi adalah dengan menyesuaikan postur anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Beberapa mata anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat dialihkan untuk pengadaan belanja sarana dan prasarana untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan rapid test dan swab test secara berkala, melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pengadaan hand sanitizer, pengadaan multivitamin, pengadaan masker, sarung tangan, dan berbagai hal lain terkait Covid-19.

Penyesuaian postur anggaran yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke dalam klasifikasi akun-akun khusus Covid-19 , yaitu :

Tabel 4.12 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Khusus Penanganan COVID-19 pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2020

AKUN	URAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI 2020	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	213.037.000	209.514.734	98,35
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9.553.000	9.551.771	99,99
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	11.901.000	11.898.729	99,98
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.731.000	8.693.000	99,56
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	121.940.000	121.940.000	100,00
	JUMLAH	365.162.000	361.598.234	99,02



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Seluruh pengadilan di wilayah D.I. Yogyakarta menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dibawah ini adalah daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah D.I. Yogyakarta :

1. Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.13 : Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2020

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PT Yogyakarta	5.086	2.805	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
2	PN Yogyakarta	3.163	1.295	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI
		7.385	3.610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
3	PN Sleman	2.730	3.195	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Wates	2.850	2.016	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
		2.182	1.478	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
5	PN Bantul	5.895	2.941	Gedung Kantor dan rumah negara	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	2.891	2.290	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2. Rumah Negara

Tabel 4.14 : Daftar Rumah Negara Tahun 2020

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PT Yogyakarta	10	7	2	1	Pemerintah RI Cq. MA RI
		4	3	1	-	Sultan Ground
2	PN Yogyakarta	19	7	12		Pemerintah RI Cq. MA RI
3	PN Sleman	12	6	3	3	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Wates	8	8	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
5	PN Bantul	8	8	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	10	10	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI

3. Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.15 : Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2020

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PT Yogyakarta	Honda	Supra100	4	Baik
		Honda	Supra 125	4	Baik
		Honda	GLIII	3	Baik
		Honda	NF125	1	Baik
2	PN Yogyakarta	Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	HONDA GL. IIISPORT	1	Baik
		Honda	HONDA SUPRA FIT X	1	Baik
		Honda	HONDA SUPRA FIT	4	Baik
		Honda	HONDA GP III MEGA PRO	2	Baik
		Honda	HONDA NF 100 D	1	Baik
3	PN Sleman	Honda	NF 100	-	Terjual
		Honda	Win	-	Terjual
		Honda	Legenda	-	Terjual
		Honda	GI III	-	Terjual
		Honda	Vario	1	Baik
		Yamaha	Alfa IIR	-	Terjual
4	PN Wates	Honda	Revo	3	Baik
		Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	GLP III	2	Baik
		Honda	GL	1	Baik
		Suzuki	Smash	4	Baik
		Kawasaki	KLX BF	2	Baik
		Honda	NF100	2	Baik
		Honda	Cbr 150	2	Baik
		Honda	VARIO	2	Baik
5	PN Bantul	Suzuki	A 100	1	Rusak
		Honda	GL-100	1	Rusak ringan
		Honda	Grand C100	1	Baik
		Honda	Supra X	1	Baik
		Honda	Supra X125	6	Baik
		Honda	Mega Pro	2	Baik
		Honda	Supra Fit	1	Baik
6	PN Wonosari	Honda	NF 100	1	Baik
		Honda	GLP III	5	Baik
		Honda	Win 100	1	Baik
		Honda	Supra X125	2	Baik

4. Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.16 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2020

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PT Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik
		Toyota	Vios	1	Baik
		Toyota	Innova G	2	Baik
		Toyota	Camry	1	Baik
		Toyota	Fortuner	1	Baik
		Toyota	Hiace	1	Baik
2	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik
		Toyota	Vios	2	Baik
		Toyota	Innova G	1	Baik
		Toyota	Innova V	1	Baik
		Toyota	Kijang KF 40	1	Baik
		Toyota	Kijang LX	1	Baik
		Toyota	Avanza	1	Baik
3	PN Sleman	Toyota	Innova	2	Baik
		Toyota	Innova	1	Pinjam pakai
4	PN Wates	Toyota	Innova	1	Baik
		Isuzu	Pantheer	1	Baik
		Toyota	Kijang Lx	1	Baik
		Toyota	Innova	1	Baik
		Toyota	Rush	1	Baik
5	PN Bantul	Toyota	Innova	2	Baik
		Toyota	Avanza	1	Baik
		Toyota	Kijang Lx	1	Baik
6	PN Wonosari	Toyota	Innova	1	Baik
		Toyota	Avanza	1	Baik

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.17 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PT Yogyakarta	Penggantian ACP

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.18 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
1.	PT Yogyakarta	1. Pemasangan pintu akses tangga. 2. Pemasangan partisi ruang tamu KPT dan WKPT.	

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemasangan partisi R. Laktasi dan R. Kesehatan. 4. pengecatan sebagian dinding gedung kantor. 5. Pemasangan ram jalur difabel. 6. Pembongkaran dan pemindahan prasasti peresmian gedung kantor. 7. Penggantian keramik kamar mandi publik, KM laki-laki Lt 2, KM Lt gedung Timur, lantai KM KPT. 8. Waterproofing dak atap gedung kantor. 9. Waterproofing dak KM gedung timur dan dak atap luar lt 1 gedung timur. 10. Pembersihan saluran pipa air bersih kantor. 11. Pembongkaran dan penggantian keramik pilar sisi selatan timur dengan ACP. 12. Penggantian dan pengecatan sebagian plafon. 13. Penggantian sebagian tirai jendela/ vertical blind R. KPT, R.WKPT, R. Command Center, R. Hakim. 14. Pemasangan tempat cuci tangan pencegahan covid19 15. pengecatan kolam dan rambu-rambu. 16. Pemasangan dan penggantian paving blok. 17. pengecatan area parkir kendaraan roda 2. 18. pengecatan pagar. 19. pengecatan pos satpam. 20. Pemeliharaan taman kantor. 	
2	PN Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan sarana-prasarana untuk kaum Disabilitas dan Rentan 2. Pemeliharaan Ruang Arsip 3. Pemeliharaan Akses Security Sistem untuk hakim dan pegawai 4. Pemeliharaan Tangga Akses Hakim 5. Pemeliharaan Halaman 	
3	PN Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua 2. Pemeliharaan Kebocoran Atap Gedung Pengadilan 3. Pemeliharaan Gedung Pengadilan Anak 4. Perbaikan Genset 5. Perbaikan CCTV 6. Perbaikan PABX 	

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
		7. Pengecatan Lahan Parkir dan Titik Kumpul	
5	PN Wates	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Dinding kantor berupa pengecatan Dinding. 2. Perbaikan Dropoff berupa penggantian Granit dengan di cor ulang. 3. Pemeliharaan Halaman penggantian paving blok untuk jalur difabel. 4. Pemeliharaan ruang PTSP berupa sekat akrilik untuk pencegahan Covid-19. 5. Perbaikan kamar mandi terdapat rembesan. 6. Perbaikan pintu rumah dinas. 7. Perbaikan paving rumah dinas. 8. Perbaikan pagar rumah dinas. 9. Perbaikan dapur rumah dinas. 	
5	PN Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan kelengkapan ruang sidang anak 2. Pembenahan ruang sidang umum 3. Pembenahan atap/saluran air 4. Pembenahan ruang laktasi/kesehatan 5. Pembenahan ruang mediasi/kaukus/ 6. Perbaikan pagar 7. Pengecatan 8. Pembenahan jaringan listrik 9. Pembenahan taman 10. e-corner 	
6	PN Wonosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecatan tembok dan plafon gedung dalam 2. Pengecatan tembok dan plafon gedung luar 3. Penambahan akses pintu masuk lantai 2 dengan fingerprint security 4. Pembuatan railing pada jalur khusus difabel (dalam gedung) 5. Pembuatan pintu belakang gedung dan kanopi 6. Pembuatan tempat wudhu dan jalur masuk khusus difabel 	

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 ini tidak ada kegiatan Penghapusan Sarana Dan Prasarana Gedung.

2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang yang memadai. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.19 : Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		PT Yogyakarta	PN Yogyakarta	PN Sleman	PN Wates	PN Bantul	PN Wonosari
1	Komputer	48	70	39	80	38	43
2	Laptop	27	51	39	17	26	21
3	Infokus/LCD	5	2	3	2	-	1
4	PABX	1	2	1	1	1	3
5	Mesin Ketik	3	10	-	3	-	9
6	Mesin Stensil	1	-	1	-	-	1
7	Mesin Fotokopi	2	1	1	2	-	1
8	AC	41	69	49	32	22	27
9	Faximile	4	5	1	1	1	3
10	Brankas	3	5	4	1	2	2
11	Sound system	7	6	4	5	2	2
12	Mesin Absensi	2	2	2	2	2	2
13	Tabung Pemadam Api	20	1	-	5	-	10
14	CCTV	7	5	2	8	1	1
15	UPS	25	4	9	7	6	10
16	Genset	1	2	1	1	1	-
17	Handy Cam	1	2	1	-	-	-
18	Pesawat telepon	35	2	15	1	3	13
19	Printer	28	42	37	73	23	40
20	Scanner	8	8	4	4	3	4
21	Server	3	3	3	2	3	3
22	Lemari Kayu	26	55	49	60	34	28
23	Lemari Besi	67	25	12	6	2	25
24	Filling Kabinet Kayu	4	-	2	-	1	-
25	Filling Kabinet Besi	45	19	24	8	27	3

26	Buffet	4	8	-	-	2	-
27	Rak	5	67	36	19	52	21
28	Meja Kerja Kayu	129	150	220	106	116	155
29	Kursi Kayu	33	54	128	106	42	60
30	Kursi Besi Metal	259	290	260	160	220	252
31	Sice	27	15	30	13	11	16
32	Bangku Panjang Kayu	3	60	67	29	26	25
33	Meja Rapat	22	3	1	6	2	-
34	Meja Komputer	23	8	6	23	5	9
35	Meja Resepsionis	2	4	2	2	1	1
36	Mesin Absensi sidik Jari	2	-	1	-	-	2
37	Kamera	1	2	1	1	1	1
38	HT	5	4	6	4	2	4
39	Sekat	-	7	10	4	3	3
40	Meja Sidang	-	-	6	4	4	3
41	Kursi Hakim	-	-	20	12	12	7
42	Meja Telepon	-	3	10	-	-	2
43	Mesin Hitung	-	1	5	-	-	4
44	Kipas Angin	-	8	33	-	12	10
45	Televisi	6	18	1	14	3	11
46	RIG	1	-	-	-	-	-
47	Kulkas	1	2	-	-	-	-
48	External Hardisk	3	-	1	-	-	5
49	Hardisk	2	-	-	-	-	5
50	Anti Virus	1	-	-	1	-	5
51	Acces Point	2	9	2	5	2	13
52	Rak Server	-	1	1	1	1	3
53	Router	-	4	2	1	2	2
54	Air Curtain	-	-	3	-	-	-
55	Switch Hub	3	-	-	3	1	-
Jumlah		948	1.109	1.155	835	718	871

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.20 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis Pengadaan	Banyaknya
1	PT Yogyakarta	Komputer	2
2	PN Yogyakarta	Komputer	2
3	PN Sleman	Komputer Infokus/LCD Lemari Besi Filling Cabinet Besi	2 1 4 5
4	PN Wates	Komputer	2
5	PT Bantul	Komputer	2
6	PN Wonosari	Komputer	2

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 3.22 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis Pemeliharaan
1	PT Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, sound, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet
	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, soundsystem, proyektor, 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan CCTV - Jaringan telpon Jaringan internet.
3	PN Sleman	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, sound, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet
4	PN Wates	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas

No	Satker	Jenis Pemeliharaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, sound, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet
5	PN Bantul	1. Pemeliharaan peralatan mesin : 2. Perawatan kendaraan dinas 3. Perawatan AC, laptop, PC, Printer, CCTV, sound system 4. Pemeliharaan jaringan : 5. Listik, 6. Intranet
6	PN Wonosari	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan AC, Laptop, PC, Printer, Fax, Fotocopy, sound system, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 ini tidak ada kegiatan Penghapusan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung.

3. Sarana Dan Prasarana Pencegahan Covid 19.

Adanya pandemi virus Covid-19 juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan perkantoran Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 baik bagi Hakim Tinggi dan ASN maupun lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 9 tahun 2020 yang merupakan perubahan SEMA 8 tahun 2020 serta SE SEKMA Nomor 8 tahun 2020 maka telah dilakukan beberapa penyesuaian jam kerja melalui Work From Home dan Work From Office serta melakukan beberapa revisi anggaran untuk menyesuaikan kondisi akibat terdampak pandemi virus Covid-19. Oleh karena itu telah dilakukan beberapa kegiatan serta penyediaan sarana prasarana pencegahan, antara lain :

1. Alat penyemprot disinfektan.
2. Tempat cuci tangan.
3. Hand sanitizer.
4. Thermogan.
5. Sarung tangan.
6. Masker.
7. Banner/ pamflet pencegahan covid-19.

Beberapa kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

a. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penularan Virus Covid-19 dan pelaksanaan Swab/ Rapid Antigen pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



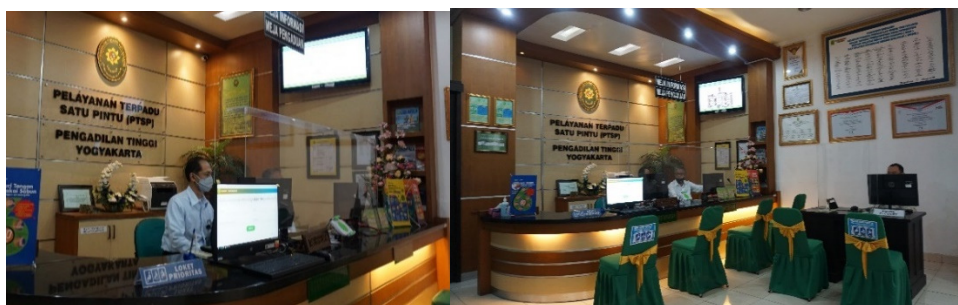
Gambar 4.1 : Sosialisasi dan pelaksanaan Swab/ Rapid Antigen Tahun 2020 Di PT Yogyakarta

b. Pelaksanaan Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



Gambar 4.2 : Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Gedung PT Yogyakarta

c. Pemasangan Akrilik pada PTSP di Lingkungan Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



Gambar 4.3 : Pemasangan Akrilik pada PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dalam rangka merespon adanya pandemi virus Covid-19 di Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta juga dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan dan pencegahan dalam rangka untuk mengurangi dan memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pada masa pandemic Covid-19, sebagai instansi pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan dan pencari keadilan dengan penerapan protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

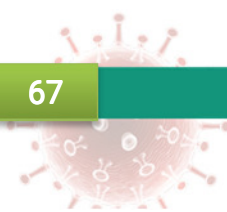
PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang dikeluarkan pada awal tahun 2019 kiranya tepat sekali untuk dijadikan sebagai solusi atau payung hukum dalam rangka untuk kegiatan penyelesaian perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara serta tata usaha militer. Disamping itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 untuk memberikan payung hukum untuk pelaksanaan persidangan secara daring dalam perkara pidana, pidana militer dan jinayat.

Dengan adanya situasi pandemi ini, maka semua Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta juga melakukan menyesuaikan postur anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Beberapa mata anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat dialihkan untuk pengadaan belanja sarana dan prasarana untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan rapid test dan swab test secara berkala, melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pengadaan hand sanitizer, pengadaan multivitamin, pengadaan masker, sarung tangan, dan berbagai hal lain terkait Covid-19.

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Usaha untuk mengendalikan dan pencegahan, untuk mengurangi dan memotong mata rantai penyebaran Virus Covid-19 adalah memastikan tentang kesiapan sumber daya manusia yang diwujudkan dalam penerapan perilaku sesuai protokol pencegahan penyebaran covid-19 yaitu :

1. Menerbitkan kebijakan pimpinan tentang pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Menerbitkan kebijakan pimpinan tentang Pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19), dalam implementasinya adalah Penerapan WFH/WFO (Work From Home/ Work From Office) yaitu diberlakukan dalam rangka pembatasan kerumunan antar pegawai di lingkungan kantor. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Pengadilan Negeri Bantul melakukan Pemeriksaan rapid test dan layanan konsultasi dengan dokter. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, telah diadakan pemeriksaan raid tes untuk seluruh pegawai guna menyoisir penyebaran virus di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. juga diadakan sesi konsultasi dengan dokter yang tersedia, terkait dengan pandemi covid-19.
4. Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan oleh pimpinan pada setiap kesempatan, dan menyerahkan kepada panitera, sekretaris serta panmud dan kasubbag untuk melakukan monitoring pada bagian masing-masing atas penerapan protokol kesehatan tersebut. diantaranya adalah kewajiban menggunakan masker, selalu mencuci tangan/ menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak/ membatasi frekuensi bertemu secara fisik antar pegawai.
5. Kebijakan tetang penanganan penerimaan berkas yang berasal dari luar berpotensi untuk membawa virus covid-19 untuk para petugas PTSP dan para pejabat dan pegawai yang berhubungan dengan berkas dari luar tersebut, yaitu selalu dengan menggunakan sarung tangan atau dilakukan sterilisasi.
6. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wates memiliki kesiapan dalam menangani penyebaran virus Covid-19 sampai-sampai membuat tutorial pembuatan handsanitizer yang di upload di kanal youtube Pengadilan Negeri Wates.
7. Kegiatan Surveilans dan advokasi aparaturnya Pengadilan Negeri Wonosari
8. Kegiatan Pemberdayaan dan Penertiban aparaturnya di Pengadilan Negeri Wonosari



2. Sarana dan Prasarana Preventif

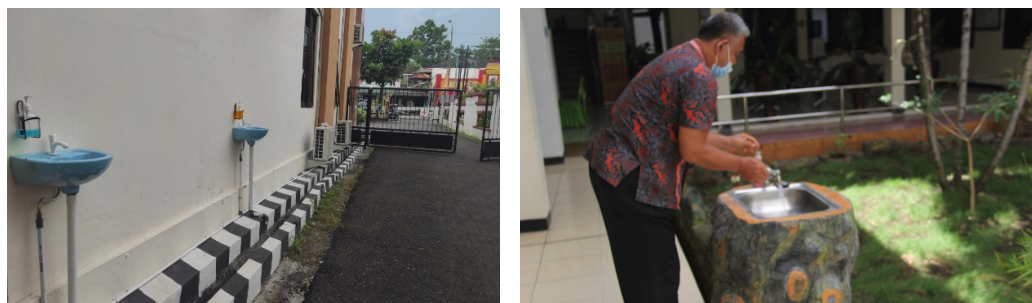
Sarana dan prasarana preventif yang disediakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta meliputi :

➤ Thermogun



Gambar 4.4 : Pengecekan suhu tubuh dengan alat Thermogun

➤ Washtafel dan sabun cuci tangan



Gambar 4.5 : Pemasangan Washtafel dan sabun cuci tangan

- Handsanitizer, ditempatkan disetiap ruang sidang dan pintu masuk gedung



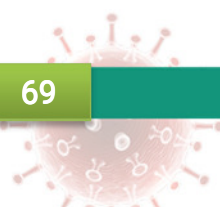
Gambar 4.6 : Penyediaan dan Pemasangan Handsanitizer

- Droplet Protektor atau Penyekat Akrilik PTSP (Devider), ditempatkan disetiap area petugas PTSP, Ruang Sidang, Petugas Antrian sidang, petugas posbakum



Gambar 4.7 : Pemasangan Droplet Protektor atau Penyekat Akrilik PTSP dan Ruang Sidang

- Masker
- Sarung Tangan



- Face shield
- Kursi berjarak pada lobi dan pada ruang tunggu

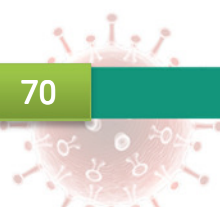


Gambar 4.8 : Pemasangan Kursi Berjarak Pada Lobi dan Ruang Tunggu

- Desinfektan



Gambar 4.9 : Melakukan Penyemprotan Desinfektan Di Semua Bagian Pengadilan

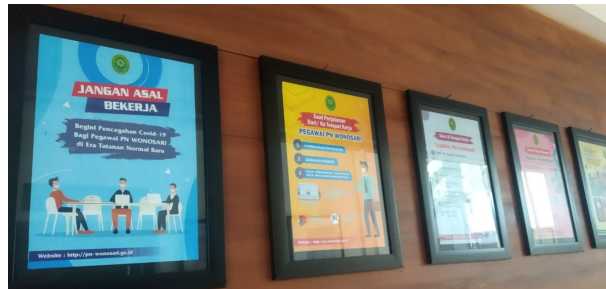


- Desinfektan Aerosol untuk berkas



Gambar 4.10 : Desinfektan Aerosol Untuk Berkas Perkara

- Pengadaan Multivitamin untuk pegawai
- Pemasangan sarana edukasi seperti leaflet, banner dan poster dilingkungan Pengadilan

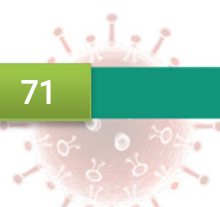


Gambar 4.11 : Sarana Edukasi Seperti Leaflet, Banner Dan Poster

- Rapid Test / Swabtest



Gambar 4.12 : Pelaksanaan Rapid Test dan Swabtest di Pengadilan Negeri



- Sarana sidang online, Mediasi Online dan Rapat Online



Gambar 4.13 : Pelaksanaan Persidangan Secara Daring/Online

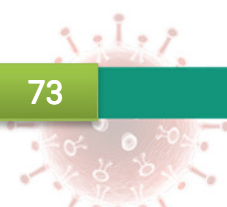
3. Tindakan Pencegahan

- Setiap pengunjung yang masuk melakukan cuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu serta harus menggunakan masker, menjaga jarak, serta terdapat tanda untuk physical distancing.
- Pembatasan Jam Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama masa pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.
- Untuk memelihara dan atau membantu meningkatkan kekebalan tubuh aparaturnya maka diberikan paket suplemen kepada seluruh aparaturnya.
- Untuk menjaga lingkungan kantor pengadilan dari paparan sumber penyakit seperti virus, bakteri, atau kuman lain yang menempel pada sarana layanan maka dilakukan penyemprotan secara rutin menggunakan cairan disinfektan untuk seluruh lingkungan kantor, terutama sarana publik dimana sering diakses dan digunakan oleh banyak orang

4. Penanganan saat Bencana

- Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan penunjukan Petugas Operator Website Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA
- Pengadilan Negeri Wates melakukan Rapid Test untuk Hakim dan Pegawai dan juga memberlakukan WFH isolasi mandiri bagi Hakim atau Pegawai yang keluarganya terpapar Covid-19, sampai dengan laporan ini dibuat tidak ada Hakim maupun pegawai yang terpapar Covid-19 karena penanganan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wates cukup sigap.

- Telah dilakukan screening awal menggunakan rapid test untuk seluruh aparaturnya pengadilan, dan hasilnya tidak ada satu pun pegawai yang reaktif terhadap tes tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terdapat aparaturnya atau keluarga dari aparaturnya tersebut yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19 maka akan dipersilakan untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- Hingga laporan ini disusun tidak ada aparaturnya di Pengadilan Negeri Bantul yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Namun ada beberapa aparaturnya yang keluarga besarnya memang terkonfirmasi terpapar virus. Akan tetapi karena aparaturnya yang bersangkutan tidak bersinggungan / berada pada lokasi dan kota/provinsi yang berbeda maka dipandang tidak perlu untuk melaksanakan isolasi mandiri.
- Di Pengadilan Negeri Wonosari Pada bulan Agustus 2020 ada pihak berperkara yang terkonfirmasi Positif Covid-19, selanjutnya Tim Satgas Covid-19 melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan sterilisasi kantor dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan tracing selama terjadi kontak di Pengadilan Negeri Wonosari. Untuk itu dilakukan Rapid Tes untuk seluruh aparaturnya pengadilan :
 - Periode pertama (6 Agustus 2020) : hasil keseluruhan non-reaktif
 - Periode kedua (13 Agustus 2020) : hasil keseluruhan non-reaktif
- Pada bulan September 2020 Di Pengadilan Negeri Wonosari, salah satu petugas pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkonfirmasi Positif Covid-19. Selanjutnya Tim Satgas Covid-19 melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan sterilisasi kantor dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan tracing kontak terhadap aparaturnya pengadilan secara keseluruhan dengan melakukan Swab Tes (PCR) pada tanggal 3 September 2020 dengan hasil keseluruhan Negatif. Selanjutnya Tim Satgas merekomendasikan petugas PTSP yang lain untuk melakukan Work From Home (WFH) selama 14 hari.



C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan Teknologi Informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya telah berkomitmen bahwa seluruh Badan Peradilan di Mahkamah Agung akan beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki komitmen dan kebijakan yang salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user baik ke dalam instansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun kepada seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya dalam melakukan implementasi terhadap setiap aplikasi yang dilakukan secara rutin.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21 : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	LCD Informasi	Kiosk
1	PT Yogyakarta	80 Mbps	4	48	30	18	9	1	4	2	-
2	PN Yogyakarta	140 Mbps	2	68	22	39	16	2	24	8	3
3	PN Sleman	100 Mbps	3	15	20	20	22	2	5	9	1
4	PN Bantul	100 Mbps	3	35	26	23	5	2	1	1	1
5	PN Wates	100 Mbps	2	80	17	73	5	1	3	15	3
6	PN Wonosari	80 Mbps, Up to 100 Mbps	3	43	21	40	8	2	14	9	2



Gambar 4.14 : Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

1. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran elektronik (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dalam implementasinya pada tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar yaitu Advokat yang telah melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun

jumlah Advokat yang sudah terdaftar dan terverifikasi di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah :

Tabel 4.22 : Keadaan Verifikasi Advokat di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta

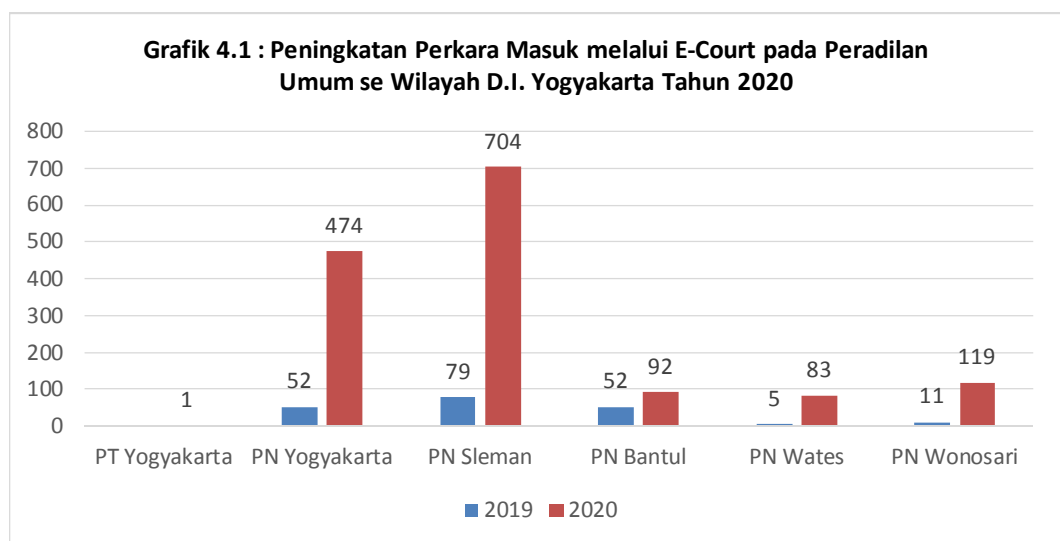
No	Akun Advokat	Jumlah
1	Advokat Terdaftar di Database	1.787
2	Sudah di Verifikasi	947
3	Belum di Verifikasi	78

Adapun statistik implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23 : Jumlah Perkara di wilayah D.I. Yogyakarta Yang Daftarkan Melalui e-Court Tahun 2020

No	Satker	Perkara Masuk	Putus	Sisa Perkara
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1	-	1
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	474	393	91
3	Pengadilan Negeri Sleman	704	560	144
4	Pengadilan Negeri Bantul	92	62	30
5	Pengadilan Negeri Wates	83	68	15
6	Pengadilan Negeri Wonosari	119	112	7
Jumlah		1473	1195	288

Tahun 2020, Pengajuan Permohonan Banding secara elektronik dapat dilaksanakan dengan menggunakan E-Court. Secara keseluruhan, penggunaan E-Court pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan seperti dalam grafik berikut:





Gambar 4.15 Pojok e-court corner Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta

2. Implementasi SIPP

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke Mahkamah Agung, website masing-masing Pengadilan Negeri juga ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pada tahun 2020, terdapat 4 (empat) Pengadilan Negeri yang menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yaitu :

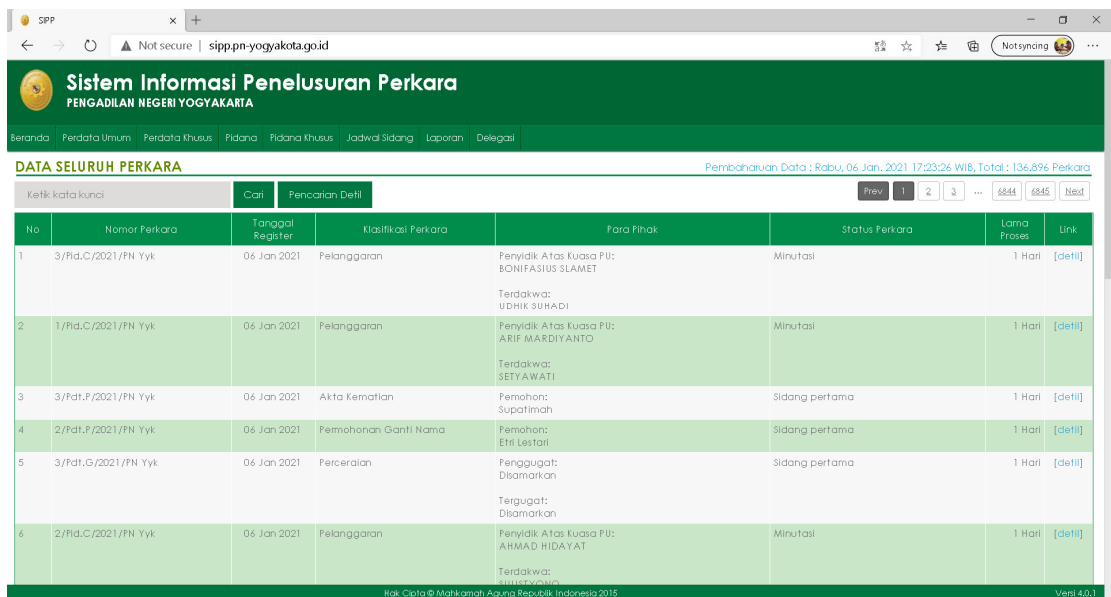
1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Sleman
3. Pengadilan Negeri Bantul
4. Pengadilan Negeri Wates

Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan SIPP versi 4.0, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 4.0.1.

Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24 : Alamat SIPP Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

No	Satker	Alamat SIPP
1	PN Yogyakarta	sipp.pn-yogyakarta.go.id
2	PN Sleman	sipp.pn-sleman.go.id
3	PN Bantul	sipp.pn-bantul.go.id
4	PN Wates	sipp.pn-wates.go.id
5	PN Wonosari	sipp.pn-wonosari.go.id
6	PT Yogyakarta	banding.mahkamahagung.go.id



Gambar 4.16 : Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri



Gambar 4.16 : Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding

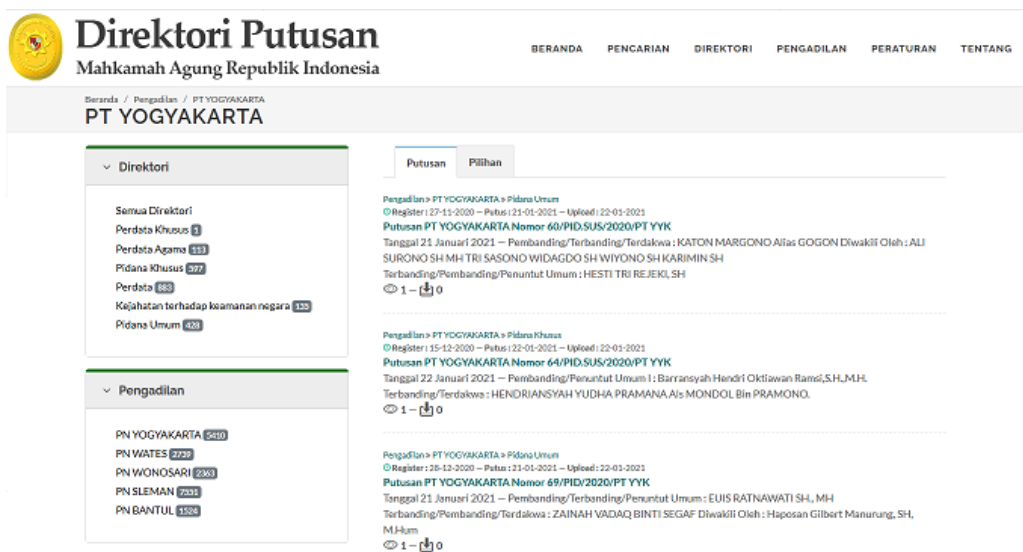
3. Implementasi Aplikasi Pendukung

1. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Peradilan Umum Wilayah D.I. Yogyakarta dapat diakses di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-yogyakarta.html>



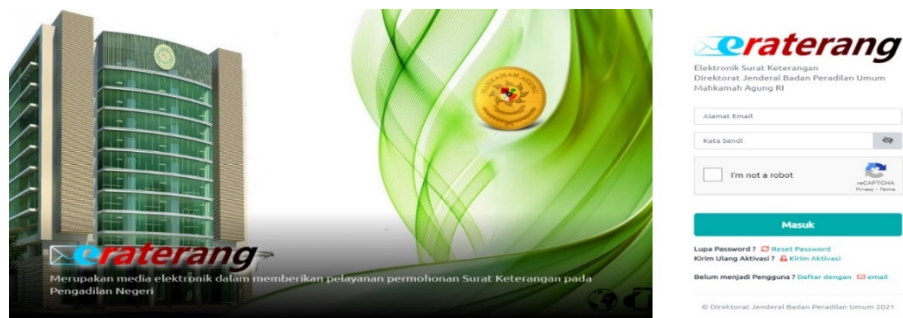
Gambar 4.16 : Tampilan Direktori Putusan Web Pengadilan Tingkat Yogyakarta

2. Aplikasi Eraterang

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).

Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

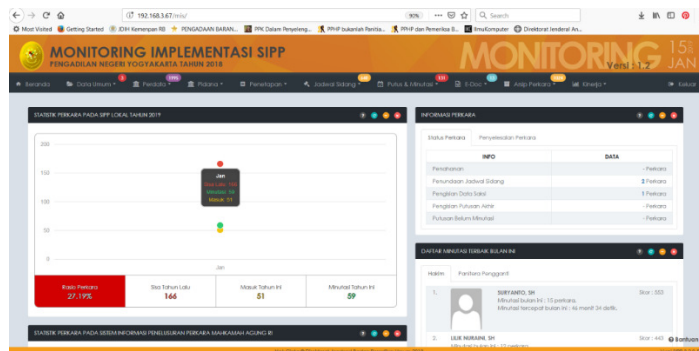
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.



Gambar 4.17 : Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama

3. Aplikasi Monitoring SIPP

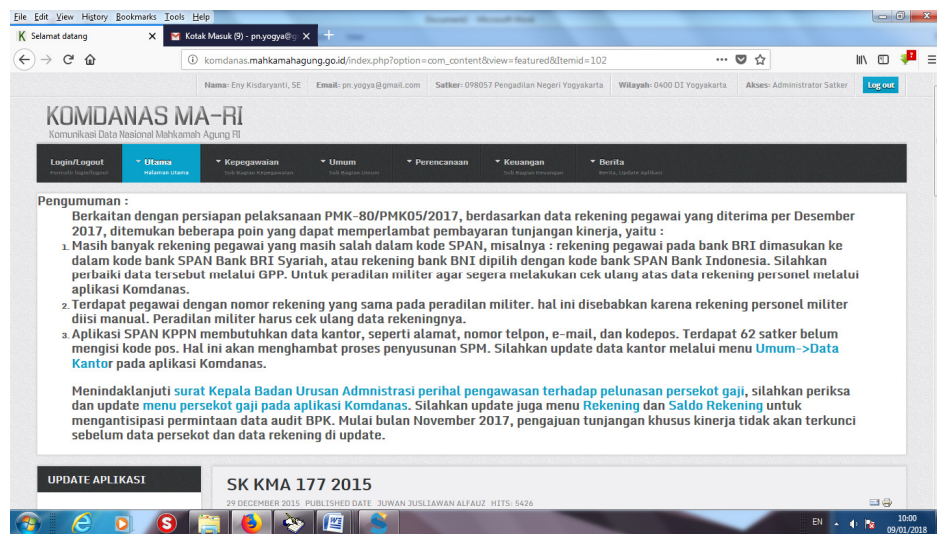
Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.



Gambar 4.18 : Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama

4. Aplikasi KOMDANAS

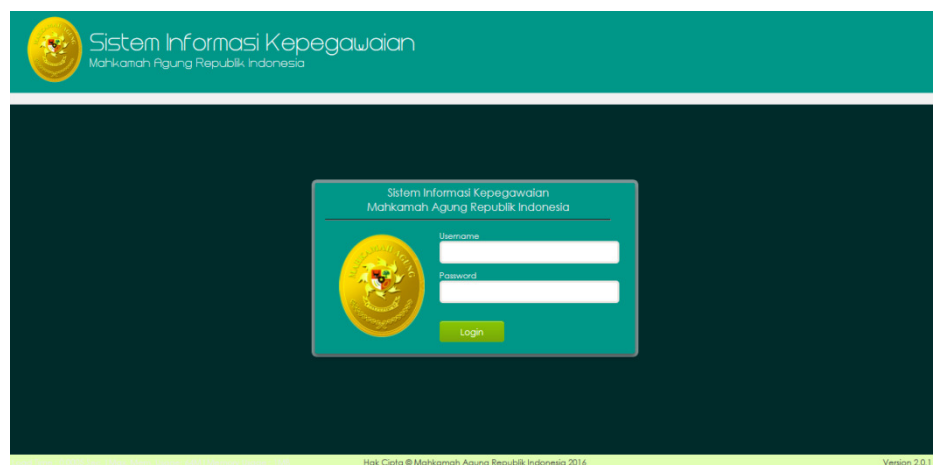
KOMDANAS atau Komunikasi Data Nasional merupakan sebuah sistem aplikasi komputasi terpadu yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bentuk aplikasi KOMDANAS ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.



Gambar 4.19 : Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi semua Peradilan

5. Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN

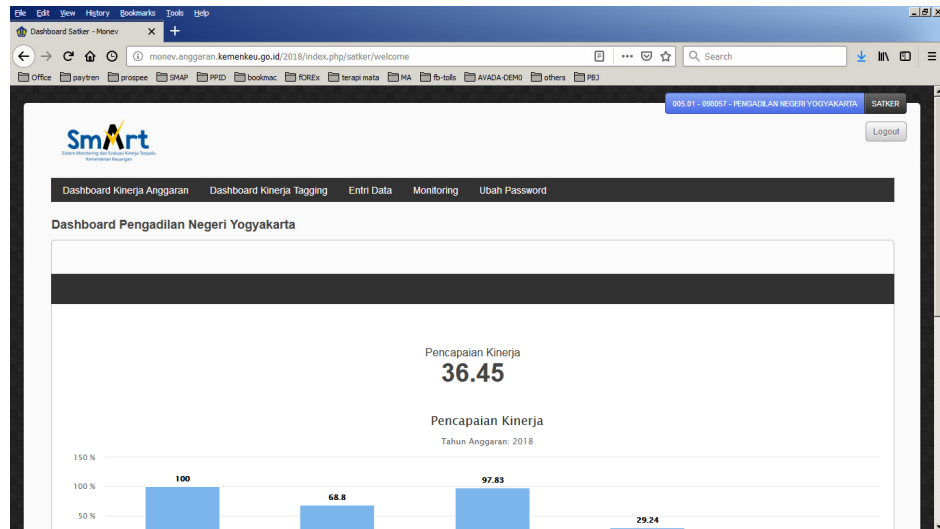
Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



Gambar 4.20 : Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi semua Peradilan

6. Aplikasi Monev SMART

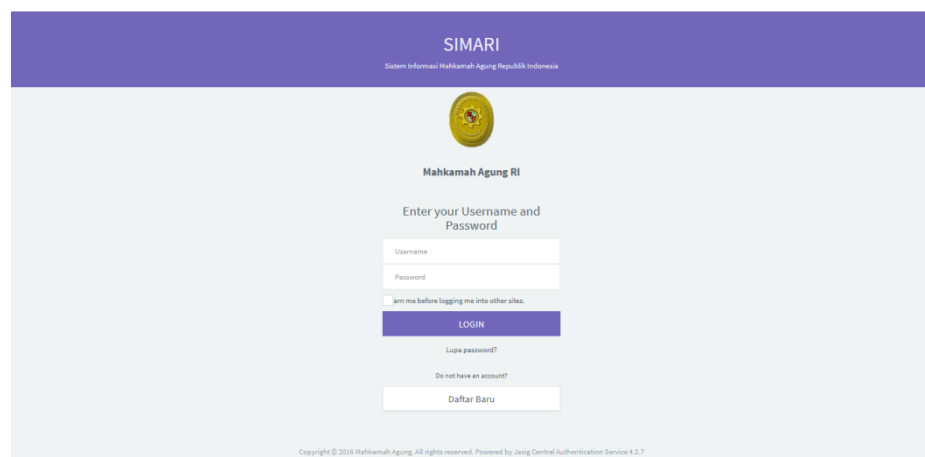
Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.



Gambar 4.21 : Tampilan Web Aplikasi Monev SMART bagi semua Peradilan

7. Aplikasi SIMARI MA RI

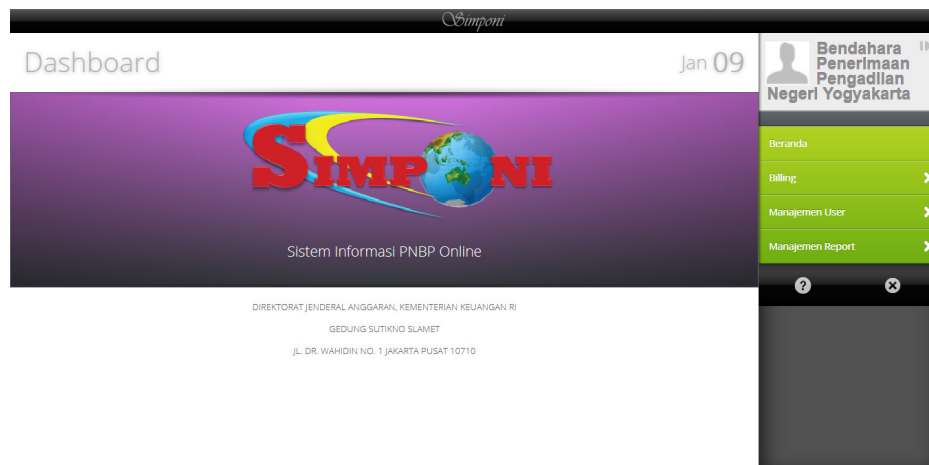
System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.



Gambar 4.21 : Tampilan Web Aplikasi SIMARI MA RI bagi semua Peradilan

8. Aplikasi SIMPONI

System informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.



Gambar 4.22 : Tampilan Web Aplikasi SIMPONI

9. Aplikasi OMSPAN

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

No	Nomor SP2D	Tanggal Selsial SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Data SP2D (Pilih)
1	170301701003566	04-01-2018	31-12-2017	0	001397,098057/2017	31-12-2017	GTUP NH-RL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00139 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	170301701003565	04-01-2018	31-12-2017	0	001387,098057/2017	31-12-2017	GTUP NH-RL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00138 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	170301701003564	04-01-2018	31-12-2017	0	001377,098057/2017	31-12-2017	GTUP NH-RL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00137 Tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	170301701003567	04-01-2018	31-12-2017	0	001407,098057/2017	31-12-2017	GTUP NH-RL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00140 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

Gambar 4.22 : Tampilan Web Aplikasi OMSPAN

10. Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan satuan kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyedia data realisasi. Level KL/Biro Perencanaan, UKE-I, dan UKE-II dapat memanfaatkan data pemantauan

satker di level komponen untuk menetapkan realisasi di level output serta indikator-indikator kerjanya.



Gambar 4.22 : Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

11. Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang mengintegrasikan dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Saat ini satker menggunakan sekitar 8 (delapan) aplikasi dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak jarang harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan menyita banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif. Melalui aplikasi SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (single database) sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif.



Gambar 4.22 : Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

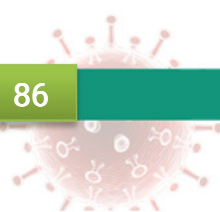
- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

Untuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mendapatkan penilaian akreditasi dengan nilai A (Excelent) dan 4 (empat) satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga sudah terakreditasi dengan mendapatkan nilai A (Excelent) yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan 1 (satu) satuan kerja yang mendapatkan nilai B yaitu Pengadilan Negeri Sleman.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Dibawah ini adalah hasil penilaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016
3. Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai B sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.011/QMR/SERTIFIKAT.1/09/2019
4. Pengadilan Negeri Wates pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.068/QMR/SERTIFIKAT/7/2017
5. Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.135/QMR/SERTIFIKAT/11/2017
6. Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2020 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.065/QMR/SERTIFIKAT/7/2017





Gambar 5.1 : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/ diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Layanan pokok PTSP di lingkungan peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta meliputi :

- 1) permohonan informasi;
- 2) pendaftaran perkara;
- 3) pembayaran biaya;
- 4) penyerahan produk pengadilan; dan
- 5) pengajuan keluhan/pengaduan.

Sedangkan untuk layanan penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia Jasa Eksternal, meliputi posbakum; bank; PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan.

C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta mengacu pada beberapa aturan diantaranya:

- a. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pada tahun 2019, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 3 satker yang telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates. Untuk tahun 2020, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 1 satker yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Wonosari dan 1 satker yang memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Negeri Wates.



Gambar 5.2 : Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

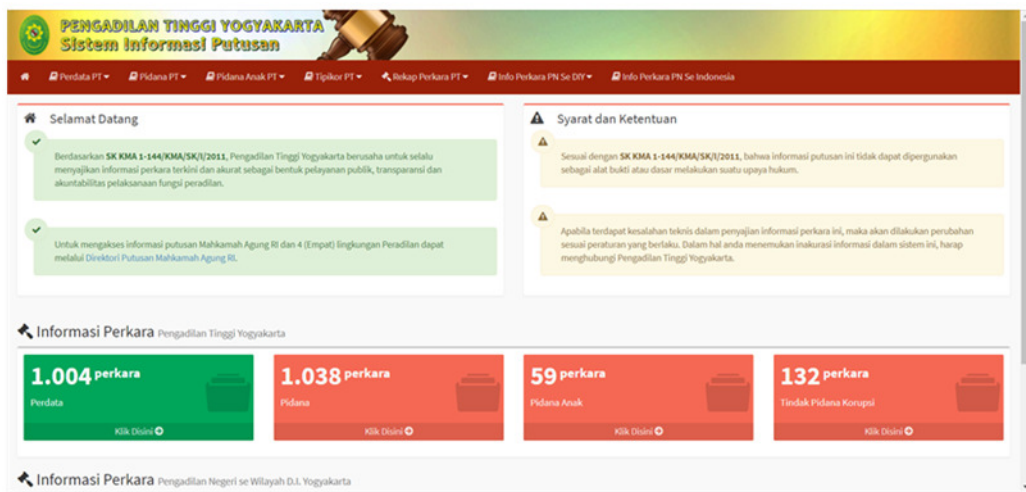
D. Inovasi Pelayanan Publik

1. SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sistem Informasi Putusan (SIPUT) merupakan portal informasi keadaan maupun Grafik perkara dan putusan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Penggunaan SIPUT diharapkan dapat sebagai backup dari Direktori Putusan MA RI dan pendukung SIPP.

Masyarakat dapat mengakses SIPUT melalui alamat :

perkara.pt-yogyakarta.go.id



Gambar 5.3 : Aplikasi SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta

2. Ruang Command Center

Command Center adalah sebuah ruangan khusus yang difungsikan sebagai Ruang Pusat Komando, Pembinaan, Pengawasan ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara Daring. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Negeri. Melalui tatap muka secara online, pimpinan bisa memastikan kedisiplinan pegawai dan mengevaluasi apakah program-program yang sudah direncanakan sudah dijalankan dengan baik.

Disamping itu, masing-masing satker bisa memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi. Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan tingkat wilayah ke depan.

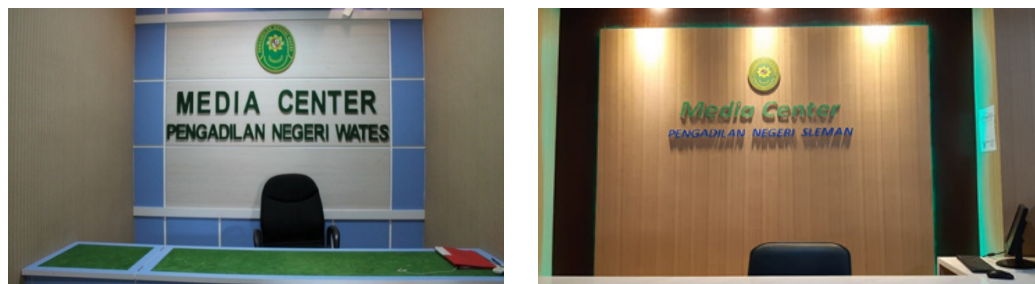
Dengan difungsikannya inovasi ini maka diharapkan tugas pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana secara maksimal.



Gambar 5.4 : Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

3. Media Center

Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates membuat inovasi ruangan Media Center, ruangan tersebut di peruntukan sebagai tempat media conference. Dengan ruangan Media Center akan memberikan kenyamanan dalam melakukan Konferensi Pers dengan Wartawan ataupun public.



Gambar 5.5 : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Wates dan Sleman

4. Antrian Sidang

Antrian Sidang adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang. Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

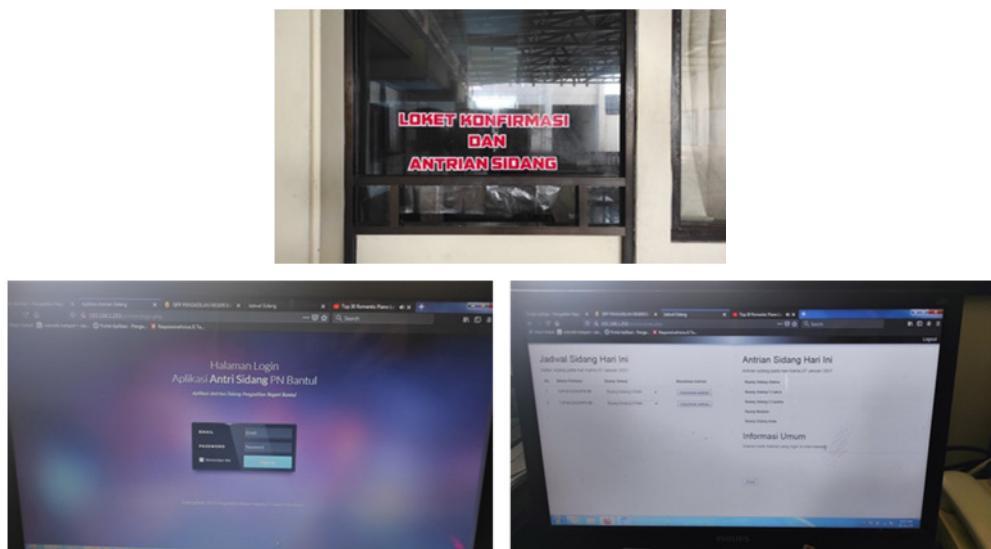
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.



Gambar 5.6 : Tampilan Inovasi Layanan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di Pengadilan Negeri Bantul juga ada inovasi Loker konfirmasi dan antrian sidang, yaitu sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.



Gambar 5.7 : Inovasi Loker konfirmasi dan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Bantul

5. Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk

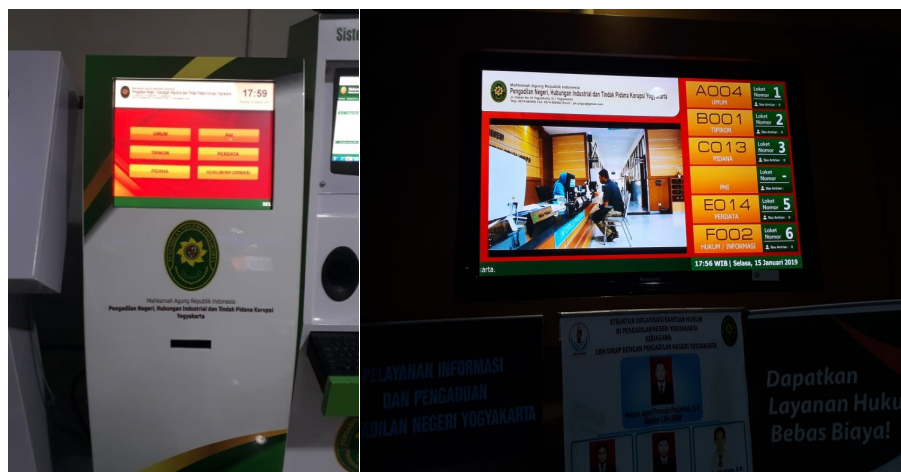
memasuki Meja PTSP dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Mesin Antrian dan Media Informasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan di Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta.

☒ Sebelum adanya inovasi

Pengunjung datang ke pengadilan langsung menuju meja PTSP, petugas tidak dapat mengetahui layanan mana yang dituju oleh pengunjung tersebut, harus bertanya lisan terlebih dahulu. Pelayanan PTSP belum tertata dengan baik & belum dapat dilakukan rekapitulasi pengunjung.

☒ Sesudah adanya inovasi

Pelayanan PTSP menjadi lebih tertata dengan baik, pengguna pengadilan mengambil nomor antrian sesuai dengan layanan yang dituju (pidana/perdata/hukum/umum) sesuai dengan keperluannya. Pada ruang tunggu disediakan TV LED untuk menampilkan urutan antrian dan panggilan dilakukan oleh system dengan audio yang jelas. Laporan rekapitulasi pengunjung juga dapat dilihat dengan jelas.

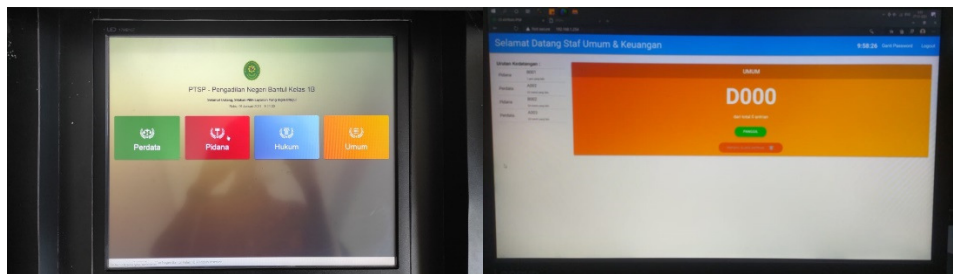


Gambar 5.8 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Yogyakarta

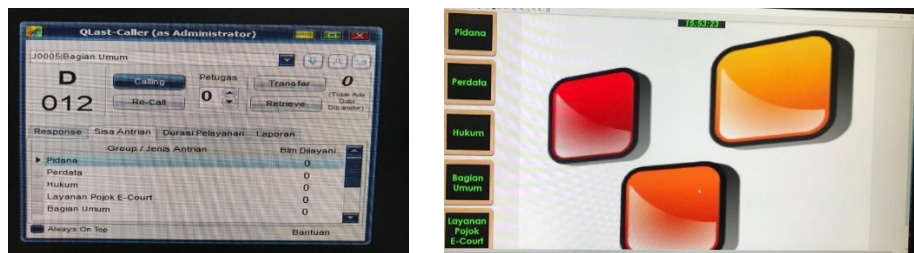




Gambar 5.9 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.10 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Bantul



Gambar 5.11 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Sleman

6. Co-working space

Co-working space merupakan inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan. Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Gambar 5.12 : Inovasi Co-working Space di Pengadilan Negeri Bantul

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates, pengunjung dapat sambil bekerja ketika menunggu persidangan di Media Edukasi.



Gambar 5.13 : Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates

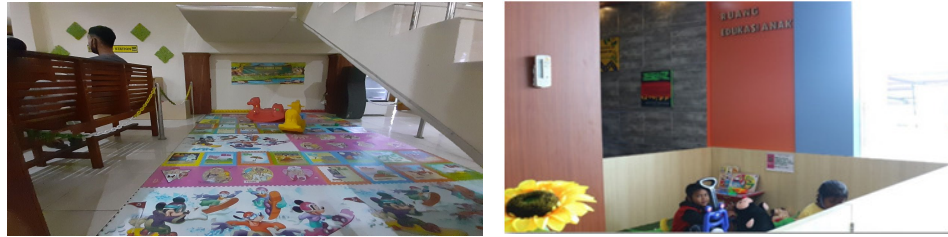
7. Ruang Pengasuhan Anak

Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta melayani pengasuhan anak selama orang tuanya di ruang pemeriksaan/ persidangan. Layanan ini bekerjasama dengan Fak. Psikologi UAD (MoU ditandatangani sejak 14 Juli 2015). Khusus petugas Psikolog dan konselor setiap hari selasa dan kamis jam 11.00-13.00 WIB. Hal ini juga sekaligus bisa untuk tempat praktik kuliah lapangan dan obyek penelitian bagi mahasiswa.



Gambar 5.14 : Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di Pengadilan Negeri Sleman juga sudah meluncurkan inovasi Tempat Pengasuhan Anak, dan Pengadilan Negeri Wates anak-anak yang ikut orang tua datang ke Pengadilan dapat menunggu sambil bermain di Tempat Pengasuhan Anak.



Gambar 5.15 : Ruang Edukasi Anak di Pengadilan Negeri Wates dan Sleman

8. Ruang Menyusui

Ruang menyusui bagi para pencari keadilan / pengunjung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.16 : Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wates dan Sleman

9. Pojok Baca

Pojok baca merupakan Inovasi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, diharapkan dapat mengeliminasi rasa jenuh masyarakat saat menunggu dengan menyediakan bahan pustaka yang ringan, rekreatif dan menghibur, maupun bahan pustaka yang dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi pembacanya. Layanan Pojok Baca ini bekerja sama dengan BPAD DIY

Masing-masing pojok baca akan dilengkapi 100 eksemplar buku yang setiap dua bulan sekali akan diganti. Buku-buku yang disediakan meliputi berbagai subjek seperti kesehatan, pengetahuan umum populer, buku-buku praktis, keagamaan serta fiksi.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates ada inovasi Pojok Edukasi, dimana pengunjung pengadilan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku yang sudah disediakan oleh pengadilan sambil menunggu layanan di pojok edukasi.

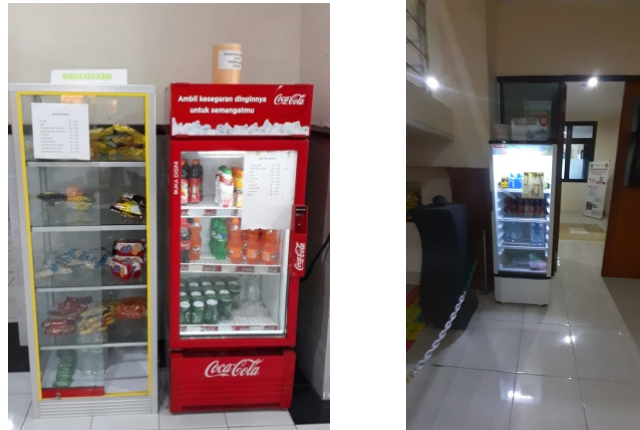


Gambar 5.17 : Inovasi Pojok Baca dan Media Edukasi di PN Yogyakarta dan PN Wates

10. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.



Gambar 5.20 : Inovasi Warung kejujuran di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman

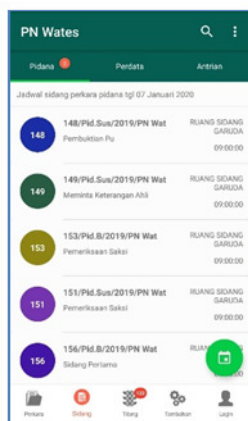
Di Pengadilan Negeri Wates juga memiliki inovasi Warung kejujuran yaitu Media Edukasi berupa kantin kejujuran, pengunjung bisa ambil bayar (ambyar) makan dan minuman secara mandiri untuk melatih kejujuran.



Gambar 5.21 : Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates

13. Mext SIPP

Mext SIPP memudahkan masyarakat untuk mengetahui jadwal sidang dan denda tilang di Pengadilan Negeri Wates melalui handphone yang berbasis android dengan mengunduh aplikasi melalui playstore



Jadwal sidang

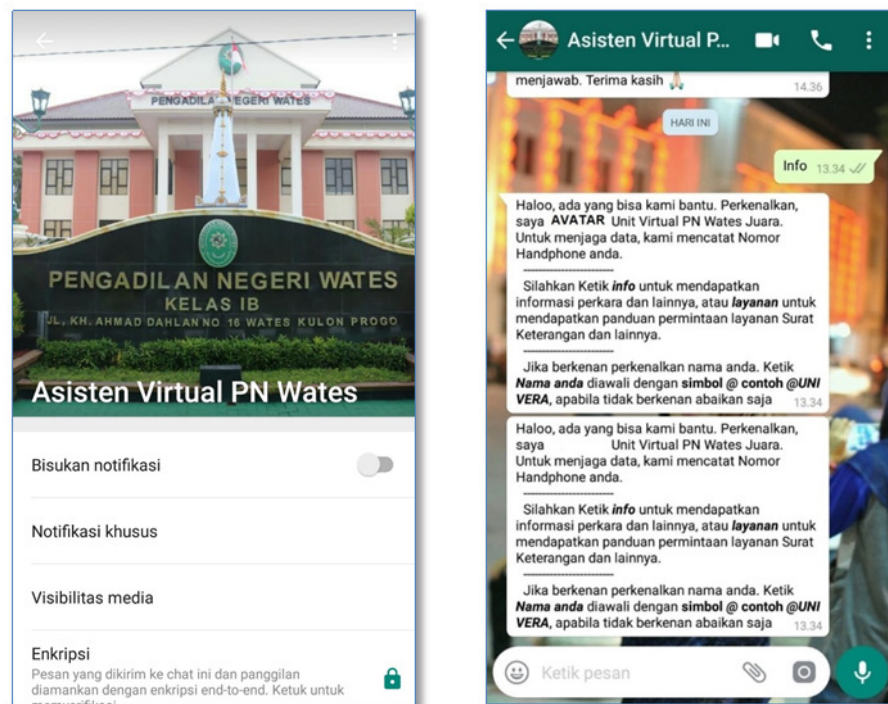


Cek denda tilang

Gambar 5.22 : Inovasi Mext SIPP di Pengadilan Negeri Wates

14. AVATAR (Asisten Virtual) dan Sivina

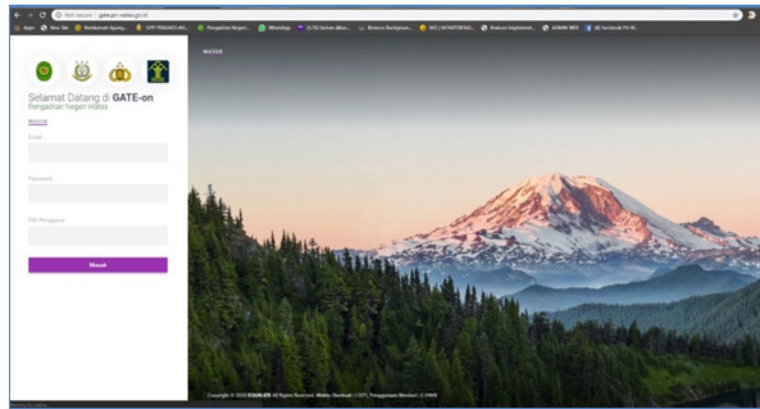
AVATAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Wates Juara), dan Sivina di Pengadilan Negeri Wonosari. Sebelum adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, masyarakat harus datang ke kantor pengadilan. Sesudah adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, informasi perkara, biaya perkara, jadwal persidangan, tilang, statistik, anggaran, kinerja pengadilan dan informasi yang lain masyarakat tidak perlu datang ke kantor pengadilan, cukup bertanya dengan Whatsapp dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi seputar pelayanan di Pengadilan Negeri Wates (AVATAR) dan Pengadilan Negeri Wonosari (Sivina) dengan cara chat langsung melalui aplikasi whatsapp, atau scan barcode yang nantinya langsung terhubung ke akun AVATAR ataupun SIVINA. Akan melayani selama 24 jam, 7 hari kerja dan bebas biaya.



Gambar 5.23 : Inovasi Avatar di Pengadilan Negeri Wates

15. Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online)

Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) yang bisa diakses melalui website, dengan membuka alamat <http://gate.pn-wates.go.id/>



Gambar 5.24 : Inovasi Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) di Pengadilan Negeri Wates

16. Pelayanan Ramah Difabel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, fasilitas tersebut ditujukan untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W13-U/252/SK/KPT/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penerapan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas Khususnya Tuna Netra dan Tuna Rungu yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kebijakan tersebut bertujuan agar Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan agar memiliki tingkat aksesibilitas yang seragam dalam melayani penyandang disabilitas. Kelima pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Fasilitas untuk para pengguna layanan penyandang disabilitas yang ada di Pengadilan Tinggi Yogyakarta antara lain guiding block, ramp, handrail, dokumen braille, toilet, hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk para penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus tersebut.

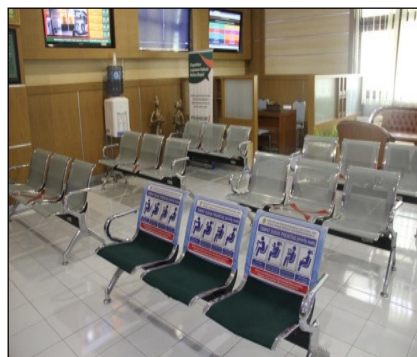
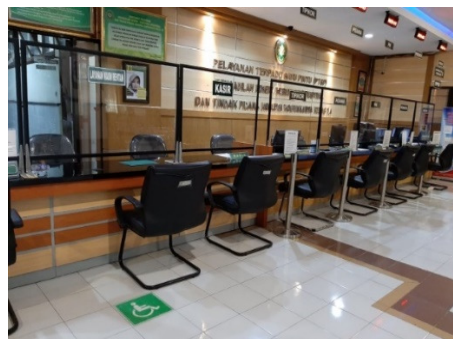
Pelayanan Ramah Difabel Pengadilan Negeri Wonosari, masyarakat pencari keadilan dengan kebutuhan khusus tuna netra lebih mudah ketika memasuki gedung pengadilan, dengan disediakannya guiding block dari jalan raya ke gedung pengadilan. Tersedia leaflet informasi berperkara dan layanan pengadilan dengan huruf Braille bagi tuna netra. Tersedia toilet khusus difable, yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat

buang air kecil atau besar dengan nyaman. Tersedia video layanan pengadilan yang disajikan dengan bahasa isyarat untuk tuna rungu dan pengadilan menyediakan alat bantu jalan seperti kursi roda dan kruk, serta alat bantu pendengaran.

Di Pengadilan Negeri Wates, Pengunjung Disabilitas lebih mudah lagi menjangkau Pengadilan Negeri Wates karena terdapat Guiding Block, mereka juga dipermudah dengan sarana meminta bantuan yang lebih cepat dan efisien ketika di kamar mandi difable terkunci atau terjadi sesuatu di ruang sidang serta bagi pengunjung berkebutuhan khusus dapat langsung terlayani tidak memerlukan antrian panjang.



Gambar 5.25 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta





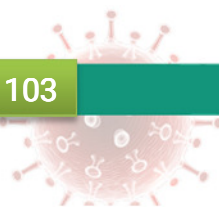
Gambar 5.26 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta



Gambar 5.27 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.28 : Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sleman



Mekanisme : e-Permohonan Informasi Akademisi adalah layanan permohonan informasi kepada akademisi, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Universitas
3. Softcopy Proposal

The image displays the user interface for the 'e-Permohonan Informasi Akademisi' service. On the left is a registration form with the following fields: 'Nama Pemohon', 'Jenis Kelamin' (with radio buttons for 'Laki-laki' and 'Perempuan'), 'Nomor Whatsapp', 'Alamat', 'Nama Universitas', 'Fakultas / Jurusan', 'Judul / Tema Penelitian', and three 'Persyaratan' sections for uploading 'Scan KTP / Kartu Identitas', 'Surat Pengantar dari Universitas', and 'Proposal'. Each upload section includes an 'Add File' button. A 'Submit' button is at the bottom. On the right is a service information page with the title 'e-Permohonan Informasi Akademisi' and a sub-header 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN TINDAK TIMAH KORUPSI YOGYAKARTA MELAJISA'. The page contains a detailed description of the service, its mechanism, and a list of requirements: 1. Scan KTP / Kartu Identitas, 2. Scan Surat Pengantar dari Universitas, 3. Softcopy Proposal. It also includes a disclaimer about Google account data and a 'Required' note.

Gambar 5.30 : Fasilitas e-Permohonan Informasi Akademisi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

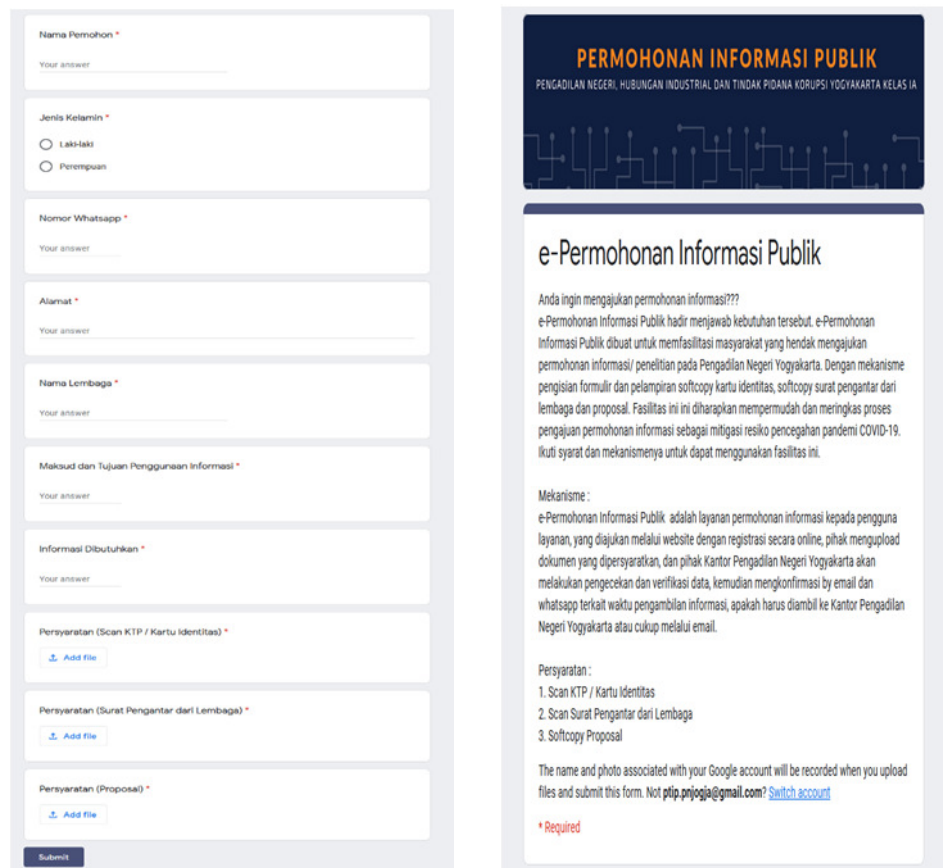
19. e-Permohonan Informasi PUBLIK

- ✓ e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan permohonan informasi. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

- ✓ Mekanisme :
e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal



Gambar 5.31 : Fasilitas e-Permohonan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta

20. e-Posbakum

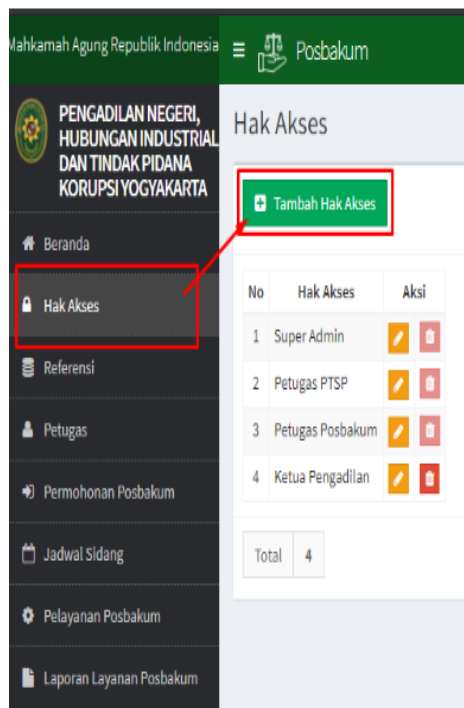
E-Posbakum adalah aplikasi yang digunakan untuk adminitrasi layanan Posbakum yang selama ini masih dilaksanakan secara manual.

Administrasi ini ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan posbakum, baik dari jenis layanan, advise yang diberikan maupun jumlah pengguna layanan.

Dengan e-Posbakum ini diharapkan Panmud Hukum, Panitera, Kasub PTIP, PPK, Sekretaris maupun Ketua Pengadilan dapat memonitoring pelaksanaan Posbakum.

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi Panmud Hukum dan Kasub PTIP : Memudahkan dalam pelaporan.
2. Bagi PPK : monev realisasi anggaran posbakum
3. Bagi Sekretaris : monev realisasi anggaran posbakum
4. Bagi Panitera : monev pelaksanaan bantuan hukum kepada pengguna layanan agar tepat sasaran
5. Bagi Ketua : monev pelaksanaan bantuan hukum dan realisasi anggaran agar tepat sasaran



Gambar 5.32 : Fasilitas e-Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta

E. Kegiatan Pelayanan Lainnya

1. Pelaksanaan SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Perjanjian Kinerja (PKT).
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Program Kerja (PK).

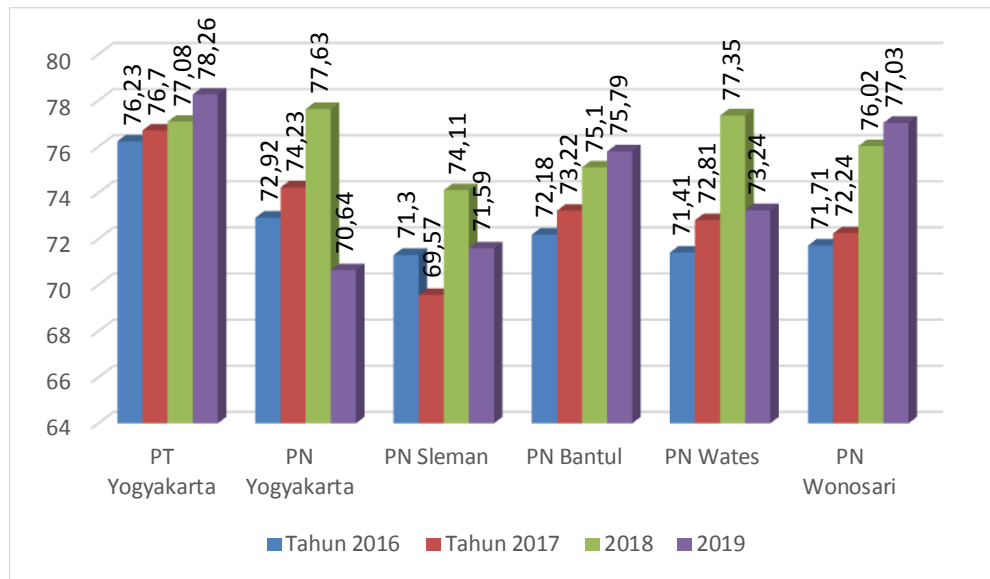
Pada periode 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I Yogyakarta telah dilakukan penilaian, sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

No	Satuan Kerja	LKjIP 2016		LKjIP 2017		LKjIP 2018		LKjIP 2019	
		Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai	Score	Nilai
1	PT Yogyakarta	76,23	BB	76,70	BB	77,08	BB	78,26	BB
2	PN Yogyakarta	72,92	B	74,23	B	77,63	BB	70,64	BB
3	PN Sleman	71,30	B	69,57	B	74,11	B	71,59	BB
4	PN Wates	72,18	B	73,22	B	75,10	B	75,79	BB
5	PN Bantul	71,41	B	72,81	B	77,35	BB	73,24	BB
6	PN Wonosari	71,71	B	72,24	B	76,02	BB	77,03	BB

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP pada Pengadilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta yang mengalami kenaikan adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan peningkatannya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 5.1 : Peningkatan Nilai LKJIP pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta
Periode 2016-2019



2. Pelaporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPNnya. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan LHKPN. Para Pejabat Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN berjumlah 86 orang, sedangkan pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaannya melalui laporan LHKPN sebanyak 86 orang yaitu :

1. Ketua	: 1 orang
2. Wakil Ketua	: 1 orang
3. Hakim Tinggi	: 36 orang
4. Hakim Yustisial	: 4 orang
5. Hakim Ad Hoc Tipikor	: 2 orang
6. Panitera	: 1 orang
7. Sekretaris	: 1 orang
8. Panitera Muda	: 4 orang
9. Kepala Bagian	: 2 orang
10. Panitera Pengganti	: 34 orang
<hr/>	
JUMLAH	: 86 orang



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan Bidang

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang adalah :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13.U/97/SK/KPT/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Protokol pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U/107/SK/KPT/V/ 2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Tim Satgas SIPP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Pengawasan Reguler

Pengadilan Tingkat Banding selaku *Voorpost* Mahkamah Agung RI harus dapat memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016.

Pada tahun 2020, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/98/SK/KPT/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukkan Tim Pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. menindaklanjuti surat tersebut, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan ke lima Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 15 Juni 2020
2. Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 16 Juni 2020
3. Pengadilan Negeri Wates, pada tanggal 17 Juni 2020
4. Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 18 Juni 2020
5. Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 22 Juni 2020

Selain itu, kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ke Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 Agustus 2020, dan tindak lanjut telah dilaporkan ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI.

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum D.I. Yogyakarta mengadakan rapat berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bagian agar semua tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Rapat berjenjang dimulai dari :

1. Rapat tiap panmud/subbagian;
2. Rapat tiap panmud/subbagian bersama hakim pengawas bidang;
3. Rapat kepaniteraan/kesekretariatan;
4. Rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

Rapat berjenjang ini masing-masing dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat berjenjang merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap Satker Pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan sistem tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang tersebut akan dibawa kedalam rapat rutin bulanan/briefing.

Rapat rutin bulanan/briefing membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang, permasalahan di tingkat kepaniteraan/kesekretariatan, dan lain-lain. Diharapkan Rapat ini bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi rapat bulanan yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang. Untuk temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan regular oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Tahunan 2020 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta, antara lain:

1. Di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan penerapan protocol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Percepatan penyelesaian perkara baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis terutama dalam hal penyesuaian dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam hal sistem kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru.
3. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan pada semua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta. Pada masing-masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Pembinaan dan pengawasan internal pada masing-masing satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif.
5. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan surveilan ke Pengadilan Negeri di bawahnya.
6. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA satuan kerja masing-masing serta telah dilakukan evaluasi secara berkala sehingga prosentase realisasi setiap tahun meningkat.
7. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional.



8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan maupun tuntutan publik dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang dalam spesifikasinya.
9. Dalam rangka mendukung program-program Mahkamah Agung RI yang berjalan dan guna meningkatkan fungsi pelayanan, masing-masing pengadilan menjalin kerjasama dengan stakeholder sesuai bidang masing-masing.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain : Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan, Kendaraan Dinas, meubelair serta peralatan dan mesin.
2. Konsistensi dan suksesnya pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada komitmen pimpinan, komunikasi internal setiap pemangku kepentingan dan anggaran.
3. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
4. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
5. Perlunya peningkatan kualitas SDM bidang teknis untuk menunjang kinerja penyelesaian perkara, baik berupa pendidikan dan pelatihan secara berkala ataupun bimbingan teknis untuk Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
6. Perlu penambahan tenaga pegawai, baik untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun, maupun untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu, antara lain: pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.



DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/276/SK/KPT/XII/2020
Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020.





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : W13.U/276 /SK/KPT/XII/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap pelaksanaan kegiatan dan program harus dilaporkan sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga yaitu tentang Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan *Outline* yang ditetapkan oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020;

KETIGA : 1. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ke Badan Urusan Administrasi melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2020



KETUA

SURIPTO

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/276 /SK/KPT/XII/2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Tahun 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020**

- Pengarah : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Penanggungjawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Koordinator : 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Anggota : 1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Tipikor
5. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
6. Kabag Umum dan Keuangan
7. Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
8. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
9. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran
10. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2020





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jln Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta 55187

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4296415

e-mail : pt.yogya@gmail.com

Website : www.pt-yogyakarta.go.id